

**KONGRES PEREMPUAN INDONESIA I**

**(1928)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

**RICA ENIPRAMITA**  
**NIM: 051314013**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH**  
**JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS SANATA DHARMA**  
**YOGYAKARTA**

**2009**

**SKRIPSI**

**KONGRES PEREMPUAN INDONESIA I**

**(1928)**

**Oleh:**

**Nama: Rica Enipramita**

**NIM: 051314013**

**Teloh disetujui oleh:**

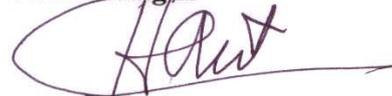
**Pembimbing I**



**(Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.)**

**Tanggal, 3 November 2009**

**Pembimbing II**



**(Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.)**

**Tanggal, 3 November 2009**

**SKRIPSI**

**KONGRES PEREMPUAN INDONESIA I**

**(1928)**

**Dipersiapkan dan ditulis oleh:**

**Rica Enipramita**

**NIM: 051314013**

**Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji**

**Pada tanggal 5 Desember 2009**

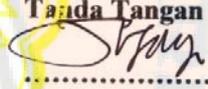
**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Susunan Panitia Penguji**

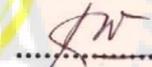
**Nama Lengkap**

**Tanda Tangan**

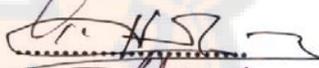
**Ketua : Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si.**

.....  


**Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd.**

.....  


**Anggota : Prof. Dr. P.J. Suwarne, S.H.**

.....  


**Anggota : Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.**

.....  


**Anggota : Drs. A.A. Padi**

.....  


**Yogyakarta, 5 Desember 2009**

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

**Universitas Sanata Dharma**

**Dekan,**


**Drs. Tarsisius Sarkim, M.ED., Ph.D.**

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## MOTTO

Kebodohan ada dalam diri setiap orang, tapi sebaiknya jangan menggunakannya

**-Paus Paulus II-**

Every day I say to my self, today I will begin

**-Antonius, pertapa dari padang pasir Mesir -**

Hanya ada satu negeri yang disebut tanah airku, ia tumbuh lewat jerih payah dan jerih payah itu adalah jerih payahku.

**-Rene de Clereg-**

Tidak seorangpun yang berjuang lebih keras daripada mereka yang berusaha mengabdikan dirinya sendiri.

**-Thomas A Kempis-**

Sukses bukan akhir dari segala-galanya, kegagalan bukan bencana tak berkesudahan, tetapi keberanian untuk terus maju dalam hidup yang akan menentukan.

**-Winston Churchill-**

Pohon Palem tumbuh ditempat yang tandus sehingga meskipun tidak berbuah seperti pohon Ara atau pohon Anggur, pohon Palem menjadi lambang kemenangan karena berhasil mengatasi dan mengalahkan badai gurun, panas terik matahari di siang hari, dingin yang menyengat di malam hari dan ketandusan serta kegersangan gurun.

**-Pepatah Romawi-**

Kepandaian ditambah karakter adalah tujuan sejati pendidikan.

**-Marthin Luther King-**

Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami.

**-2 Korintus 4:7-**

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa cinta dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ✚ Kedua orang tuaku, bapak H.R. Acarius dan Ibu Yuliana
- ✚ Adikku, Yovita dan Veronika
- ✚ Pade Frans
- ✚ Sahabat-sahabatku di Pendidikan Sejarah Angkatan 2005
- ✚ Para pendidikkku di Pendidikan Sejarah

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

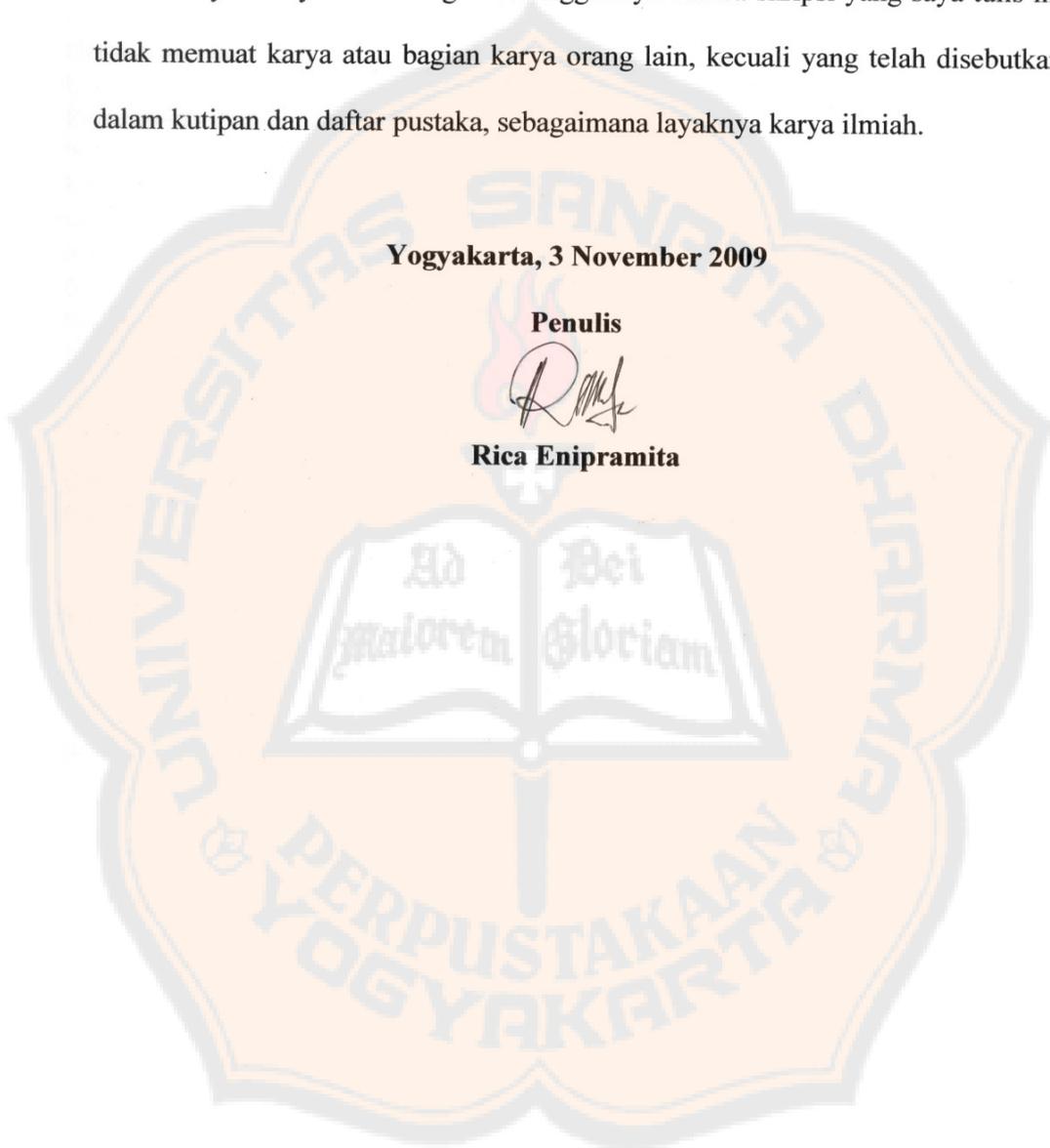
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 3 November 2009

Penulis



Rica Enipramita



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk Kepentingan Akademis

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Rica Enipramita  
NIM : 051314013

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: **Kongres Perempuan Indonesia I (1928)** beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mrendiskusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Yogyakarta  
Pada tanggal: 3 November 2009

Yang menyatakan



(Rica Enipramita)

**ABSTRAK**

**Judul: Kongres Perempuan Indonesia I (1928)**

**Oleh: Rica Enipramita**

**NIM: 051314013**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsi dan menganalisis: 1) latar belakang sosial dan politik dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia I, 2) pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I, 3) Hasil dari Kongres Perempuan Indonesia I.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi 4 tahap, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan multidimensional yang terdiri dari pendekatan historis, politik, sosial, dan kebudayaan. Sedangkan model penulisan yang digunakan adalah model deskriptif analisis, yaitu model penulisan sejarah yang menguraikan kejadian /fakta dan peristiwa masa lalu berdasarkan hubungan sebab-akibat.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah 1) Jika terdapat aksi gerakan politik pada masyarakat Indonesia dan perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam bidang sosial maka Kongres Perempuan Indonesia I (1928) akan terjadi. Perbedaan perlakuan dalam bidang sosial menyangkut perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam hukum (perkawinan) dan kesempatan memperoleh pendidikan, terjadinya poligami dan perkawinan anak usia dini, 2) Jika peserta Kongres Perempuan Indonesia I dapat mengatasi perbedaan pendapat mengenai poligami maka Kongres Perempuan Indonesia I akan berjalan lancar 3) Jika peserta Kongres Perempuan Indonesia I (1928) dapat memecahkan masalah-masalah sosial dan politik maka Kongres Perempuan I akan berhasil. Masalah sosial yang berhasil dipecahkan adalah masalah yang menyangkut perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam hukum (perkawinan) serta kesempatan memperoleh pendidikan, terjadinya poligami dan perkawinan anak usia dini. Sedangkan dalam bidang politik adalah keterlibatan perempuan dalam dunia politik.

Hasil dari skripsi ini adalah, 1) adanya aksi gerakan politik pada masyarakat Indonesia dan perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam bidang sosial mengakibatkan dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia I, 2) peserta Kongres Perempuan Indonesia I dapat mengatasi perbedaan pendapat mengenai maka Kongres Perempuan Indonesia I berjalan lancar, 3) peserta Kongres Perempuan Indonesia I dapat memecahkan masalah-masalah sosial dan politik sehingga Kongres Perempuan I berhasil.

**ABSTRACT**

**Title: THE FIRST INDONESIAN WOMEN CONGRESS (1928)**

**By: Rica Enipramita**  
**NIM: 051314013**

The aim of this thesis is describing and analyzing about, 1) the social and political background of The First Indonesian Women Congress in 1928, 2) the implementation of The First Indonesian Women Congress, 3) Result of The First Indonesian Women Congress.

This research uses history method, consist of four steps, 1) Collecting sources, critical sources, interpretation, and historiography. The research approach uses political approach, social approach, and cultural approach. This research uses analitical description method that explains the fact of the past, based on cause and effect.

The hypothesis of this research are 1) If there were political movement and different treatment between women and men in social sector The First Indonesian Women Congress would happen. The different treatment in social sector includes the different position between women and men in marriage law, the opportunity to get education, polygamy, and premarital marriage, 2) If the members of The First Indonesian Women Congress could solve the different opinion about polygamy, The first Indonesian Women Congress would be successful, 3) If the members of The First Indonesian Women Congress could solve the social and political problem, The First Indonesian Women Congress would be successful. The social problem which had been successfully solved are the different position between women and men in marriage law, the opportunity to get education, polygamy, and premarital marriage. While, in political sector is the involvement of women in political world.

Result of this thesis are 1) There is political movement in Indonesian people and different treatment between women and men in social sector which its result is The First Indonesian Women Congress, 2) The members of The First Indonesian Women Congress can solve the different opinion about polygamy so The First Indonesian Women Congress had been successful, 3) The members of The First Indonesian Women Congress can solve the social and political problem so The First Indonesian Women Congress had been successful.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sebab berkat rahmat dan karunia-Nyalah skripsi yang berjudul **Kongres Perempuan Indonesia I (1928)** ini dapat diselesaikan. Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah memberikan ijin atas penulisan skripsi ini
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah memberikan ijin atas penulisan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta yang telah memberikan ijin, dan motivasi kepada penulis.
4. Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H, selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar telah membimbing, memberi masukan dan memberi motivasi kepada penulis.
5. Drs. A.K. Wiharyanto, M.M, Selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberi motivasi kepada penulis.
6. Para dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan pengetahuan yang membuka cakrawala berpikir penulis selama penulis belajar di Perguruan Tinggi.
7. Mas Robertus Marsidiq selaku staf administrasi Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah banyak membantu kelancaran proses perkuliahan.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8. Pihak Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah membantu penulis referensi mata kuliah dan sumber bagi skripsi penulis.
9. Pihak Perpustakaan Colese St. Ignatius Kota Baru Yogyakarta dan Perpustakaan FISB UGM yang telah membantu penulis menemukan sumber bagi skripsi penulis.
10. Orangtuaku yang hebat dan tidak pernah berhenti memberi dukungan dan kasih sayang.
11. Adikku Yovita dan Veronica, yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasi.
12. Sahabat-sahabatku Angkatan '05, Icha Tanti\_Iyex Hesty, Mida, Merri, Erna, Shinta, Rini, Susi, Novi, Rarash, Miyex, Feli, Ika, Al\_Dudu, Hendra, Yono, Prima, Nur\_Itox, Anjar.
13. Teman-teman kost 15c

Penulis menyadari kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dengan terbuka penulis menerima masukan, dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan Universitas Sanata Dharma.

Yogyakarta, Oktober 2009

Penulis

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL .....                       | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....      | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                  | iii     |
| HALAMAN MOTTO .....                       | iv      |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                 | v       |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....           | vi      |
| ABSTRAK .....                             | vii     |
| ABSTRACT .....                            | viii    |
| KATA PENGANTAR .....                      | ix      |
| DAFTAR ISI .....                          | xi      |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                     | xiii    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                  |         |
| A. Latar Belakang Masalah .....           | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....                  | 5       |
| C. Tujuan Penulisan .....                 | 5       |
| D. Manfaat Penulisan .....                | 6       |
| E. Tinjauan Pustaka .....                 | 6       |
| F. Landasan teori .....                   | 11      |
| G. Hipotesis .....                        | 20      |
| H. Metode dan Pendekatan Penelitian ..... | 22      |
| I. Sistematika Penulisan .....            | 27      |

**BAB II LATAR BELAKANG SOSIAL DAN POLITIK**

**DILAKSANAKANNYA KONGRES PEREMPUAN INDONESIA I**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>A. FAKTOR POLITIK .....</b>  | <b>29</b> |
| a. Keadaan Politik Masa Hindia Belanda .....                                | 30        |
| b. Aksi Pergerakan Nasional .....   | 33        |
| c. Kemunculan dan Aksi Organisasi<br>Politik Perempuan Indonesia .....      | 41        |
| <b>B. FAKTOR SOSIAL .....</b>   | <b>42</b> |
| a. Keadaan Perempuan Indonesia .....  | 42        |
| b. Kemunculan Gerakan Perseorangan<br>dan Organisasi Sosial Perempuan ..... | 45        |

**BAB III PELAKSANAAN KONGRES PEREMPUAN INDONESIA I**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>A. Latar belakang sosial, politik, dan<br/>pendidikan tokoh Kongres Perempuan Indonesia I .....</b> | <b>51</b> |
| <b>B. Peran Tokoh Gerakan Perempuan<br/>Dalam Kongres Perempuan Indonesia I .....</b>                  | <b>56</b> |
| <b>C. Persiapan Kongres Perempuan Indonesia I .....</b>  | <b>58</b> |
| <b>D. Pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I .....</b>  | <b>59</b> |
| a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kongres Perempuan<br>Indonesia I .....                                 | 59        |
| b. Masalah yang dibahas dalam Kongres Perempuan<br>Indonesia I .....                                   | 61        |

**BAB IV HASIL KONGRES PEREMPUAN INDONESIA I**

**A. Keputusan Kongres Perempuan Indonesia I ..... 78**

**B. Pengaruh Kongres Perempuan Indonesia I**

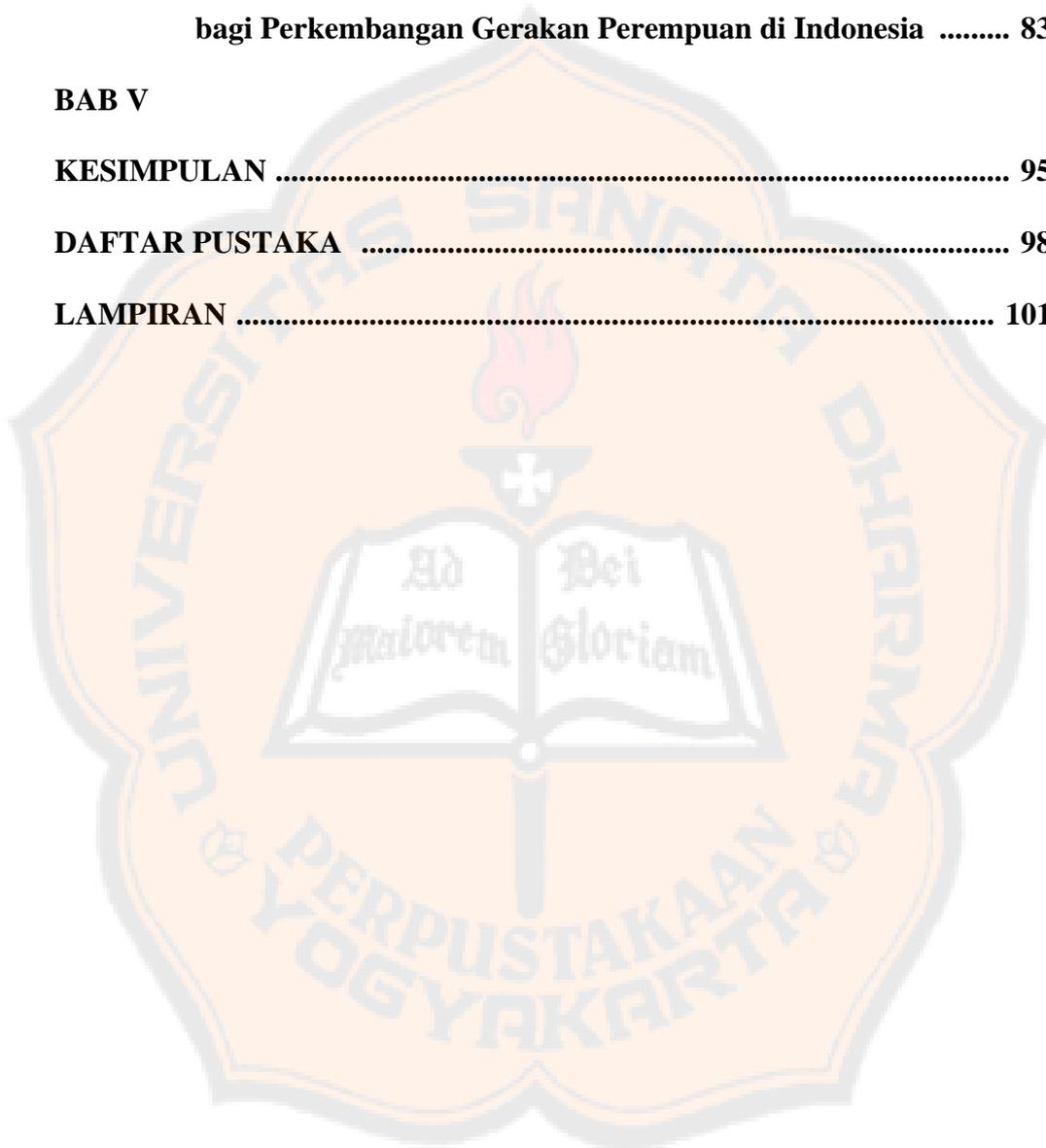
**bagi Perkembangan Gerakan Perempuan di Indonesia ..... 83**

**BAB V**

**KESIMPULAN ..... 95**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 98**

**LAMPIRAN ..... 101**



**DAFTAR LAMPIRAN**

|   |     |
|---|-----|
| Lampiran 1. Organisasi perempuan Indonesia yang dibentuk sebelum tahun 1928 .....         | 101 |
| Lampiran 2. 30 Organisasi perempuan yang bhadir dalam Kongres Perempuan Indonesia I ..... | 102 |
| Lampiran 3. Keputusan Kongres Perempuan Indonesia I .....                                 | 104 |
| Lampiran 4. Peserta Kongres Perempuan Indonesia I .....                                   | 108 |
| Lampiran 5. Panitia Kongres Perempuan Indonesia I .....                                   | 109 |
| Lampiran 6. Silabus .....   | 110 |
| Lampiran 7. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran .....  | 111 |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Tahun 1928 merupakan tahun bersejarah bagi bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Pada tahun itu banyak terjadi kejadian-kejadian penting yang merupakan ancaman bagi pemerintah kolonial Belanda. Kongres Pemuda Indonesia II dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Berselang dua bulan kemudian perempuan juga tidak ingin kalah dalam menunjukkan aksinya. Maka diadakanlah Kongres Perempuan Indonesia I.

Kongres Perempuan Indonesia merupakan langkah Paling awal dan berani dalam gerakan perempuan Indonesia terutama untuk masa itu. Ada beberapa alasan mengapa Kongres Perempuan Indonesia dikatakan sebagai yang pertama dan berani. Alasan *pertama* adalah karena kaum perempuan pada masa itu memiliki ruang gerak yang sangat sempit, pekerjaannya hanyalah mengurus dapur, anak dan suami. Di mata masyarakat perempuan kala itu hanya merupakan pelengkap kehidupan saja.

*Kedua*, pemerintah kolonial membuat larangan bagi kaum bumiputera untuk melaksanakan kongres. Pemerintah kolonial memandang kongres sebagai ancaman bagi langgengnya kekuasaan mereka. Terlaksananya Kongres Perempuan Indonesia Pertama merupakan bukti keberanian perempuan Jawa pada masa itu.

---

<sup>1</sup> Susan Blackburn, *Kongres Perempuan Pertama, Tinjauan Ulang*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal. xiii.

Uniknya keberanian itu muncul dari perempuan-perempuan yang kebanyakan umurnya masih tergolong sangat muda. Sebagian besar pencetus dan peserta kongres adalah perempuan berusia 20-an. Memang sebagian besar dari mereka merupakan golongan terpelajar namun ada yang tidak pernah sama sekali mengenyam pendidikan formal seperti Ny. Soekonto selaku ketua Kongres. Nasionalisme mereka pada saat itu juga muncul. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keharusan untuk menggunakan bahasa Indonesia, walaupun dengan susah payah.

Terkecuali Nyi. Hadjar Dewantara yang tetap menggunakan bahasa Jawa dalam pidatonya.<sup>2</sup> Namun penggunaan bahasa Jawa oleh Nyi. Hadjar Dewantara dalam pidatonya tidak mengurangi nasionalismenya sebab sebagian besar peserta kongres merupakan orang Jawa yang juga tidak terlalu memahami bahasa Indonesia. Nyi. Hadjar Dewantara juga banyak berjuang di balik kemajuan yang bisa diperoleh oleh perempuan pada masa itu yang masih bisa dinikmati sampai sekarang ini.

Meskipun terlaksananya kongres perempuan Indonesia Pertama mendapat banyak sokongan dari kaum nasionalis laki-laki pada masa itu seperti Ali Sastroamidjojo dan Ki Hadjar Dewantara namun menjadi suatu kebanggaan sebab perempuan seperti Soejatin, Ny. Soekonto, dan Nyi Hadjar Dewantara memiliki inisiatif brilian untuk membuat langkah awal bagi gerakan perempuan Indonesia. Dengan bantuan Nn. Sunaryati sebagai juru tulis dan sekaligus sebagai panitia inti, mereka mengundang perkumpulan-

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. xii.

perkumpulan perempuan wanita lainnya di Yogyakarta untuk menghadiri pertemuan I.<sup>3</sup> Kongres dihadiri oleh 30 organisasi perempuan yang merupakan organisasi agamis dan non-agamis. Organisasi agamis yang hadir pada kongres perempuan Indonesia Pertama, seperti Aisyiyah, Natdatoel Fataat, Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling (JIBDA), dan Wanita Katolik. Sedangkan yang non Agamis antara lain Wanita Utama, Wanita Taman Siswa, dan Poetri Indonesia. Dari ke-30 organisasi yang hadir dalam Kongres Perempuan Indonesia I, terdapat beberapa yang belum dikenal namun radikal seperti Nadhatoel Fataat. Kemajemukan dan perbedaan pendapat peserta konges perempuan Indonesia Pertama merupakan suatu nilai lebih, sebab mereka berani mengungkapkan pendapat mereka masing-masing dan mau menghormati pendapat orang lain walaupun terdapat perdebatan yang cukup serius.

Kongres Perempuan Indonesia Pertama ini juga tidak luput dari pengawasan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pejabat penasihat urusan pribumi, Ch. O. Van der Plas melaporkan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai berikut:

*“Laporan dari berbagai pihak memandang konferensi ini telah berhasil. Dalam kesempatan ini juga kenyataannya bahwa perempuan sering lebih realistik, lebih berimbang dan lebih beradab dalam pendekatan mereka disbanding lelaki...Organisasi ini pantas mendapatkan selamat dan perhatian secukupnya”.*<sup>4</sup>

Suatu hal yang menarik mengingat Van der Plas menugaskan istri salah seorang pegawai negeri bawahannya, yaitu Patih Datoek Toemenggoeng

---

<sup>3</sup> G.A. Ohorella, dkk. *Peranan Wanita Indonesia Dalam Pergerakan Nasional*, Jakarta, Depdikbud, 1992, hal. 20.

<sup>4</sup> Susan Blackburn, *op.cit.*, hal xxi.

untuk menghadiri kongres tersebut dengan syarat harus memberikan laporan lengkap kepada Van der Plas mengenai jalannya kongres. Istri dari Patih Datoek Toemenggung bernama Rangkajo Chairael Sjamsoe Datoek Toemenggoeng. Beliau adalah pemimpin gerakan perempuan yang pada saat itu sedang naik daun. Dilihat dari namanya maka sudah bisa ditebak bahwa beliau adalah orang Minangkabau dan memang itulah kenyatannya. Lapornya berisikan tinjauan rinci dan simpatik seorang pengamat kongres. Beliau mengatakan dalam laporannya bahwa yang hadir dalam kongres tersebut berjumlah 600 sampai 1000 orang mulai dari yang tua sampai yang muda, yang berpendidikan sampai dengan yang tidak berpendidikan. Istri Datoek Toemenggoeng juga menyatakan keheranannya sebab tidak ada satu istri pejabat, tamu, wartawan Eropa yang hadir pada saat itu padahal pers Indonesia terwakili dengan baik.

Sesuatu yang bertolak belakang apabila dicermati bahwa perintis Kongres Perempuan Indonesia adalah perempuan-perempuan yang sebelumnya mengikuti Kongres Pemuda Indonesia II. Dari semangat Sumpah Pemuda perempuan dan organisasi perintisnya mencanangkan kongres yang sama sekali berbeda dengan Kongres Pemuda II. Dalam Kongres Pemuda Indonesia II, hal-hal “berbau” politik mewarnai suasana Kongres. Sedangkan dalam Kongres Perempuan Indonesia lebih difokuskan pada masalah sosial kewanitaan.

Hal yang dibahas dalam Kongres Perempuan Indonesia I ini masih sebatas konteks sosial budaya, belum merambah ke masalah politik. Hal ini terlihat dari beberapa masalah pada saat itu yang menjadi perhatian :

1. Kedudukan wanita dalam hukum perkawinan (Islam)
2. Perlindungan anak-anak dan wanita dalam perkawinan
3. Mencegah perkawinan anak-anak
4. Pendidikan bagi anak-anak Indonesia, terutama bagi anak-anak gadis

Masalah-masalah di atas masih terus dibahas hingga kongres PPII yang keempat. Sejak saat berlangsungnya Kongres Perempuan Indonesia I maka Organisasi ataupun perkumpulan-perkumpulan perempuan terus berkembang pesat sampai pada akhirnya Organisasi-organisasi perempuan siap dan menyatakan diri untuk masuk ke dunia politik.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa latar belakang politik dan sosial dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia I?
2. Bagaimana pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I ?
3. Apa hasil dari Kongres Perempuan Indonesia Pertama I?

### **C. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan yaitu,:

1. Untuk mendeskripsi dan menganalisis latar belakang sosial dan politik dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia I.
2. Untuk mendeskripsi dan menganalisis pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I.
3. Untuk mendeskripsi dan menganalisis hasil dari Kongres Perempuan Indonesia I.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagi Universitas Sanata Dharma

Tulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan pembelajaran sejarah di Universitas Sanata Dharma terutama dalam penulisan karya ilmiah.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Tulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Ilmu Pengetahuan Sejarah khususnya dalam Sejarah Indonesia tentang Kongres Perempuan Indonesia Pertama.

3. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini memberi pengalaman bagi penulis dalam membuat suatu karya ilmiah serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Kongres Perempuan Indonesia Pertama

## E. Tinjauan Pustaka

Skripsi ini berjudul “Kongres Perempuan Indonesia Pertama (1928)”. Skripsi ini dibuat menggunakan metode studi pustaka, maka untuk membahasnya diperlukan buku-buku atau dokumen yang membahas tentang Kongres Perempuan Indonesia Pertama (1928) serta buku-buku lain yang mendukung agar dalam penulisan skripsi ini bisa menghasilkan tulisan yang bermutu baik.

Adapun sumber yang digunakan dalam penulisan ini ada dua macam yaitu sumber *primer* dan sumber *sekunder*. Sumber primer adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata, bisa tertulis (dokumen), bisa tidak tertulis (artifact dan informan). Dokumen dapat berupa notulen rapat, arsip laporan, surat perjanjian, dan sebagainya. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang disampaikan oleh bukan saksi mata, biasanya buku-buku yang ditulis orang yang tidak menyaksikannya.

### a. Sumber Primer

*Suyatin Kartowiyono, Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia, Yayasan Idayu Jakarta (1975)*. Buku ini berisi tentang kebangkitan perempuan Indonesia mulai dari perjuangan Kartini, pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I yang merupakan langkah awal kerjasama antar perkumpulan Indonesia sampai pada deklarasi kaum perempuan dalam kongres KOWANI ke-XIII di Jakarta pada tahun 1974, sumbangsih perempuan Indonesia terhadap bangsa dan Negara serta harapan-harapan Suyatin terhadap gerakan perempuan selanjutnya.

*Suyatin Kartowiyono, Mencari Makna Hidupku, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta (1983).* Buku ini bercerita tentang kehidupan Suyatin sejak masa kanak-kanak sampai masa tuanya. Buku ini lebih dominan bercerita tentang keadaan perempuan di masa kecil Suyatin dan perjuangannya dalam menuntut hak-hak perempuan.

#### **b. Sumber Sekunder**

*Andy Yentriyani, Politik Perdagangan Perempuan, Galang Press Yogyakarta (2004).* Buku ini berisi tentang jaringan dan proses perdagangan perempuan antara Indonesia dengan Taiwan.

*G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20 I, Kanisius Yogyakarta(1998).* Buku ini berisi tentang Pergerakan Nasional di Indonesia pada abad ke-20 yang diawali oleh kemunculan Budi Utomo sampai dengan perundingan Linggajati. Sebagai bagian dari Pergerakan Nasional maka buku ini juga membahas tentang pergerakan perempuan yang diawali dengan pergerakan sosial perempuan dalam masyarakat. Sebagai kelanjutan dari pergerakan perempuan maka dibahas tentang Kongres Perempuan Indonesia I (1928).

*G.A. Ohorella, dkk, Peranan Wanita Indonesia Dalam Pergerakan Nasional, Depdikbud Jakarta (1992).* Buku ini berisi tentang munculnya perkumpulan-perkumpulan perempuan serta peran dan aktivitas mereka di masa penjajahan Belanda dan Jepang sampai pada saat menyambut kemerdekaan. Buku ini juga membahas tentang Kongres Perempuan Indonesia I (1928) sebagai awal konsolidasi perempuan untuk membuat suatu

perubahan mulai dari perubahan (gerakan) sosial sampai pada munculnya gerakan politik perempuan Indonesia.

*Maggie Humm, Feminisms, Harvester Wheatsheaf London, 1992.*

Buku ini berisi tentang munculnya feminisme dan gerakan feminis di Perancis, Inggris, dan Amerika. Dalam buku ini juga dibahas mengenai feminisme dalam sejarah, hukum dan lain sebagainya.

*Abdurrachman Surjomihardjo, Sejarah Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta 1880-1930, Yayasan untuk Indonesia, Yogyakarta (2000).*

Pembahasan buku ini difokuskan pada hubungan antarlembaga seperti pendidikan, Pegawai Negeri dan pers nasional yang menentukan arah gerakan sosial di Yogyakarta. Sebagai bagian dari gerakan social di Yogyakarta yang berdampak nasional maka Kongres Perempuan Indonesia I (1928) dipaparkan dalam buku ini.

*A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Dian Rakyat Jakarta (1991).* Buku ini berisi tentang perjuangan organisasi politik, sarekat kerja, keagamaan, perempuan, dan pemuda pada periode 1908 sampai 1942 serta keinginan-keinginan politik pada saat berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia.

*Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yayasan Bentang Budaya Jakarta (1995).* Buku ini berisi tentang pengertian dan manfaat sejarah, langkah-langkah dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sejarah, kesalahan-kesalahan sejarawan, hubungan antara sejarah dan pembangunan, serta ramalan sejarah.

*Louis Gottchalk. Mengerti Sejarah. Jakarta: Indonesia University Press( 1975).* Buku ini berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian dan penulisan sejarah. Dalam buku dijelaskan bagaimana mengubah sesuatu yang tidak menarik menjadi menarik untuk dijadikan bahan penelitian dalam sejarah sehingga dipaparkan juga tentang metode penelitian dan penulisannya.

*Sartono Kartodirjo, dkk, Sejarah Nasional Indonesia V, Balai Pustaka, Jakarta (1977).* Buku ini berisi tentang perkembangan sejarah Indonesia mulai dari Zaman kebangkitan nasional sampai dengan masa akhir Hindia Belanda. Politik colonial Belanda mendorong munculnya pergerakan nasional mulai dari gerakan pemuda nasionalis, gerakan yang bersifat keagamaan, sampai dengan gerakan perempuan.

*Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme, Gramedia Jakarta (1990).* Buku ini berisi tentang kemunculan dan perkembangan organisasi pergerakan nasional sejak masa penjajahan Belanda sampai muncul dan berkembangnya nasionalisme.

*Maria Ulfah Subadio dan Ny. T.O. Ihromi, Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1978).* Buku ini berisi tentang peran dan kedudukan perempuan Indonesia dalam kehidupan social, politik, agama, hokum dan budaya.

*Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer, Yayasan Idayu Jakarta (1978).* Buku ini berisi tentang pengalaman Penulis dalam penelitian Sejarah kontemporer.

*Joshua S. Goldstein, war and gender, Cambridge University Press, Cambridge (2001).* Buku ini berisi tentang perbedaan gender yang dijadikan alat untuk membedakan kemampuan antara laki-laki dan perempuan dan juga kontribusi perempuan dalam perang yang dengan jelas membuktikan bahwa perbedaan karakter (gender) antara laki-laki perempuan tidak menghalangi keikutsertaan perempuan dalam pekerjaan yang dianggap merupakan “wilayah” laki-laki”.

*Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, (2007).* Buku Ini berisi tentang pengertian dari kata-kata dan istilah dalam bahasa Indonesia.

*Adam Kuper dan Jessica Kuper, Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, PT. Grafindo Jakarta (2000).* Buku ini berisi tentang sejumlah teori dan fakta yang ada dalam Ilmu Sosial.

## **F. Landasan Teori**

Judul dari skripsi ini adalah Kongres Perempuan Indonesia I (1928). Hal penting yang harus diketahui dalam skripsi ini adalah kejelasan mengenai masalah yang dibahas sesuai judul yang tertera. Oleh sebab itu menjadi penting pula untuk memberikan alur berpikir yang jelas dalam landasan teori

ini. Dalam landasan teori ini penulis akan membagi judul menjadi beberapa sub judul agar terbentuk alur berpikir yang jelas.

#### a) Perempuan Indonesia

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia perempuan merujuk pada makhluk yang diberi anugerah dapat melahirkan anak, memiliki sifat yang lebih sensitif dibandingkan dengan laki-laki.<sup>5</sup> Secara fisik perempuan juga lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. *Indonesia* pertamakali muncul dalam jurnal ilmiah Singapura pada tahun 1850 yang ditulis oleh George Samuel Winsor Earl dan James Richardson Logan berjudul *The Ethnology of the Indian Archipelago*. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan tanah air kita, sebab istilah "*Indian Archipelago*" terlalu panjang dan membingungkan. Logan memungut nama Indonesia yang dibuang Earl, dan huruf u digantinya dengan huruf o agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia.<sup>6</sup> Pada dasawarsa 1920-an, nama "Indonesia" yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga nama "Indonesia" akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Akibatnya pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu.

Perempuan yang dimaksud dalam skripsi yang membahas Kongres Perempuan Indonesia I (1928) ini adalah perempuan yang tergabung dalam

---

<sup>5</sup> Pusat Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2007, hal. 856.

<sup>6</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_nama\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_nama_Indonesia)

organisasi perempuan maupun yang tergabung dalam organisasi pergerakan nasional. Organisasi perempuan yang ada pada masa Hindia Belanda antara lain Putri Mardika yang berdiri di Jakarta pada tahun 1912, Wanita Susila di Pematang yang didirikan pada tahun 1918, Putri Budi Sehati di Surabaya yang didirikan pada tahun 1919, Wanita Mulya di Yogyakarta yang didirikan pada tahun 1920, dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Selain organisasi perempuan yang telah tercantum di atas terdapat juga organisasi perempuan yang berafiliasi pada organisasi nasional (pergerakan nasional), seperti Wanita Taman Siswa (1922), Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling (1925), dan putri Indonesia (1927).

Organisasi perempuan yang tertera di atas merupakan organisasi perempuan yang berdiri dan berada di wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Tahun 1920-an merupakan tahun “keramat” bagi bangsa Indonesia sebab pada tahun-tahun itu terjadi gejolak kebangkitan nasional yang besar. Oleh karena itulah organisasi perempuan yang tergabung dalam kongres perempuan tahun 1928 menyebut dirinya sebagai Perempuan Indonesia. Walaupun Kongres Perempuan Indonesia I (1928) tidak membahas masalah politik namun tetap memakai slogan Indonesia sebab penyelenggaraan Kongres sama sekali terdorong oleh arus kebangkitan nasional.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kongres Wanita Indonesia, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1978, hal. 16-17.

<sup>8</sup> Dengan sendirinya dalam perkumpulan-perkumpulan pemuda-pemuda inilah yang terutama dapat diterima faham Indonesia bersatu yang dihidup-hidupkan oleh Perhimpunan Indonesia dan PNI; tetapi juga dalam perkumpulan kaum ibu (jenis ke-2) dan dalam “bagian wanita” pergerakan laki-laki (jenis ke-1) anjuran dan panggilan kebangsaan mendapat persetujuan. Maka terjadilah Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta, pada tanggal 22-25 Desember 1928. A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat, hal. 112.

Perempuan Indonesia pada masa itu masih mengalami perbedaan yang cukup serius dibandingkan dengan laki-laki. Pada saat itu sebagian besar dari perempuan Indonesia adalah perempuan yang buta huruf karena sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan. Perempuan yang boleh bersekolah pada masa itu hanyalah perempuan dari kalangan sosial atas yakni kaum bangsawan. Walaupun sama-sama merupakan keturunan bangsawan terjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dibatasi dalam mengenyam pendidikan. Sementara itu di kalangan rakyat jelata perempuan dan laki-laki sama-sama tidak mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Ruang gerak perempuan pada masa itu sangat terbatas. Perempuan hanya bertugas untuk mengurus rumah tangga. Dalam rumah tangga perempuan dan anak-anak sering mengalami kekerasan. Perempuan sering mengalami *poligini*, yaitu perceraian sepihak oleh laki-laki sedangkan perempuan tidak boleh mengajukan cerai. Kekerasan pada anak-anak yaitu dengan adanya tradisi perkawinan anak. Perempuan dan anak-anak pun kerap kali menjadi korban perdagangan (*trafficking*).<sup>9</sup>

#### **b) Gerakan Sosial Perempuan**

Pergerakan perempuan yang ada di Indonesia diawali oleh suatu gerakan sosial. Gerakan sosial adalah tindakan terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat disertai program terencana dan ditujukan pada

---

<sup>9</sup> Trafficking adalah rekrutmen atau pemindahan orang oleh pihak lain dengan menggunakan kekerasan, ancaman penggunaan kekerasan, penyelewengan kekuasaan atau posisi dominan, penipuan ataupun segala bentuk kekerasan, untuk tujuan mengeksploitasi orang-orang tersebut secara seksual maupun ekonomi untuk kepentingan pihak lain seperti si perekrut, mucikari, traffickers, perantara, pemilik rumah bordil, pelanggan atau sindikat kriminal.

suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga-lembaga yang ada.<sup>10</sup> Gerakan sosial perempuan adalah suatu gerakan yang berjuang untuk menaikkan derajat (kedudukan) perempuan dalam masyarakat. Gerakan ini sering dinamakan pergerakan emansipasi, yaitu pergerakan yang bertujuan untuk mencapai persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan terutama yang menyangkut urusan keluarga dan perkawinan, misalnya agar anak wanita tidak semata-mata menjadi koki dalam keluarganya, agar wanita terhindar dari kawin paksa, agar kebiasaan poligami dihapus dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Pembedaan dan kekerasan yang mereka alami menjadi suatu kegelisahan dalam diri mereka. Ketika Belanda masuk wacana mengenai persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki pun mulai masuk dan sering menjadi pembicaraan dalam organisasi perempuan Indonesia. Hal ini menjadi wajar sebab perempuan Belanda merupakan perempuan yang sudah sangat mengenal feminisme. Perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middleburg sebuah kota di selatan Belanda pada tahun 1785.<sup>12</sup> Sejarah dunia menunjukkan bahwa perempuan dirugikan dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh laki-laki apalagi di masyarakat yang bersifat patriarki.

Kemunculan feminisme di berbagai Negara seringkali didorong adanya semangat revolusi nasional. Jika melihat pengalaman gerakan perempuan Amerika Serikat dan Perancis, kedua-duanya pun timbul dan termotivasi

---

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *op. cit.*, hal. 356.

<sup>11</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 I*, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hal. 53.

<sup>12</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme>

dalam situasi revolusioner yang diciptakan oleh gerakan pembebasan nasional melawan Inggris dan Revolusi Borjuis Perancis 1789.<sup>13</sup> Revolusi membawa pengaruh terhadap makna baru dalam politik, terutama pada kehidupan rumah tangga, peningkatan peran perempuan pada kedudukan problematic dalam orde politik baru, kedudukan yang tetap bertahan sampai sekarang.<sup>14</sup> Gema deklarasi kemerdekaan dan *human Rights* yang dituangkan dalam amandemen konstitusi Amerika (amandemen 1-10) juga mempengaruhi wanita Amerika untuk berjuang mendapatkan kebebasan dan persamaan hak.<sup>15</sup> Hal yang sama terjadi di Indonesia pada masa Hindia Belanda. Terselenggaranya gerakan sosial perempuan pertama di Indonesia yakni, Kongres Perempuan Indonesia I (1928), tidak terlepas dari semangat zamannya yaitu kebangkitan nasional (revolusi kemerdekaan). Seperti halnya sumpah pemuda, kongres perempuan yang diselenggarakan ditahun yang sama juga ingin mewujudkan semangat yang sama dari para anggota gerakan perempuan di masa itu.<sup>16</sup>

Gerakan perempuan Indonesia yang terwujud dalam Kongres Perempuan Indonesia I (1928) dapat dikategorikan sebagai gerakan protes. Terdapat dua tokoh besar dalam teori gerakan sosial, yaitu Gramsci dan Bourdieu. Gramsci dikenal dengan teori konfliknya sedangkan Bourdieu dikenal dengan teori dominasi simbolik. Implikasi dari teori konflik adalah teori hegemoni. Dalam teori hegemoni kelas buruh tidak lagi dianggap sebagai

---

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> Sara, M. Evans, *Lahir Untuk Kebebasan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1994, hal. xxvi-xxvii.

<sup>15</sup> Lucia Juningsih, *Wanita Dalam Sejarah Pertumbuhan Demokrasi di Amerika Serikat (1776-1920)*, Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah, seri XXVI, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2000, hal. 101.

<sup>16</sup> Susan Blackburn, *op, cit.*, hal. xviii-xix.

pusat gerakan revolusioner, bukan lagi sebagai titik fokus dan bukan lagi menempati posisi sebagai unsur utama perubahan sosial. Teori ini juga memiliki ide bahwa faktor kesepakatan politik jauh lebih penting daripada sekedar proses reproduksi kultural oleh institusi-institusi sosial. Sementara inti teori dominasi simboliknya Bourdieu adalah kesewenangan kultural. Kelompok-kelompok pinggir akhirnya memeluk budaya dominan dan mengabaikan budaya sendiri.<sup>17</sup>

Dalam gerakan sosial juga dikenal teori lainnya yaitu teori protes. Protes adalah pernyataan untuk tidak menyetujui, menentang atau menyangkal kondisi yang ada.<sup>18</sup> Gerakan ini merupakan gerakan paling umum di Negara industri seperti Amerika. Gerakan protes di Amerika diwakili oleh gerakan hak-hak sipil, gerakan feminis, gerakan hak kaum *gay*, gerakan anti nuklir dan gerakan perdamaian. Gerakan protes dibagi lagi menjadi dua, yaitu gerakan reformasi dan gerakan revolusi. Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, ekonomi, atau agama di dalam suatu masyarakat atau agama.<sup>19</sup> Gerakan reformasi tujuannya hanya untuk mencapai reformasi pada batasan tertentu dan tidak ingin merombak ulang seluruh masyarakat. Dengan kata lain gerakan reformasi merupakan upaya memajukan masyarakat tanpa mengubah struktur dasarnya.

Pada umumnya protes menuntut adanya kebijakan baru di bidang lingkungan hidup, politik luar negeri, atau perlakuan terhadap kelompok etnis, ras, atau agama tertentu. Sedangkan gerakan revolusioner bertujuan

---

<sup>17</sup> <http://netsains.com/2008/03/lebih-jauh-mengenal-gerakan-sosial/>

<sup>18</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *op. cit.*, hal. 900.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 939.

merombak ulang seluruh masyarakat dengan cara melenyapkan institusi-institusi lama dan mendirikan institusi baru. Kongres perempuan Indonesia Pertama termasuk gerakan sosial jenis reformasi. Walaupun Kongres Perempuan Indonesia I tidak terlepas dari semangat revolusi kemerdekaan namun kongres ini merupakan suatu aksi protes terhadap kedudukan dan pandangan terhadap perempuan Indonesia pada masa itu. Tujuan Kongres Perempuan Indonesia Pertama hanya terbatas pada perjuangan persamaan dan keadilan hak perempuan. Kendati Kongres Perempuan Indonesia memiliki tujuan untuk memperjuangkan persamaan dan keadilan hak perempuan namun gerakan ini bukan merupakan suatu gerakan protes radikal terhadap kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.<sup>20</sup>

### c. Kongres Perempuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kongres artinya rapat besar. Sejak feminisme dikenal di Negara maju seperti Eropa dan Amerika perempuan kerap kali mengadakan suatu gerakan dalam menuntut hak dan kesamaan derajat mereka dengan laki-laki. Feminisme harus dipahami sesuai dengan kondisi Negara kemunculannya. Terdapat beberapa macam feminisme di seluruh dunia antara lain, feminisme liberal, sosialis, marxis, dan radikal.<sup>21</sup>

Feminisme radikal bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Masyarakat patriarkhal menggunakan fakta tertentu mengenai fisiologi perempuan dan laki-laki (kromosom, anatomi, hormone) sebagai dasar untuk membangun serangkaian

---

<sup>20</sup> G. Moedjanto, *op. cit.*, hal 22

<sup>21</sup> Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu –ilmu sosial edisi II*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2000, hal. 354.

identitas dan perilaku “maskulin” dan “feminin” yang berlaku untuk memberdayakan laki-laki dan melemahkan perempuan. Dalam proses mencapai tugas ideologis ini, masyarakat patriarkhal berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa konstruksi budayanya adalah “alamiah” dan karena itu “normalitas” seseorang bergantung pada kemampuannya, untuk menunjukkan identitas gender, yang secara kultural dihubungkan kepada jenis kelamin seseorang.<sup>22</sup> Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik. Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem pemilikan. Lembaga perkawinan yang melegalisir pemilikan pria atas harta dan pemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa perbedaan gender.

Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran ini mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Namun antara feminisme Marxis dan sosialis terdapat persamaan, yaitu lebih komprehensif dalam menyoroti eksploitasi ekonomi berdasarkan gender.<sup>23</sup> Terdapat juga jenis feminisme lainnya yakni feminisme liberal. feminisme liberal menyatakan bahwa kemerdekaan kaum perempuan harus mendapat pengakuan hukum dan hak-hak hukum, politik, dan ekonomi mereka harus setara dengan hak kaum

---

<sup>22</sup> Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought*, Colorado, Westview Press, 1998, hal. 72.

<sup>23</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *loc.cit*

pria. Perbedaan posisi dan perang gender feminis liberal dapat menjadi sesuatu yang diatasi oleh adanya pengakuan terhadap tingkat perbedaan mereka dari analisis individual untuk feminis liberal dan kelompok gender dari perbedaan paham feminis. Feminis liberal berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang opresif, yaitu dari peran-peran yang digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk memberikan tempat yang lebih rendah, atau tidak memberikan tempat sama sekali bagi perempuan, baik di dalam akademi, forum maupun pasar.<sup>24</sup> Kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh dirinya sendiri maupun kelompoknya, jadi feminis liberal dan feminis lainnya tidak bertentangan. Feminis liberal berpendapat bahwa kemampuan laki-laki dan perempuan itu sama. Feminis liberal juga sering menerima perbedaan gender di dalam beberapa masa di atas kebenaran individu.<sup>25</sup>

Feminisme aliran lain juga memiliki masalah berbeda yang harus diperjuangkan. Kemunculan feminisme membawa mereka untuk mengadakan kongres. Kongres berskala internasional pun bukan merupakan hal yang tabu lagi. Begitu juga dengan Indonesia, marginalisasi terhadap perempuan dilihat sesuai dengan kenyataan sesungguhnya yang ada dalam masyarakat. Kongres Perempuan Indonesia I (1928) sebagai aksi dan langkah awal persatuan perkumpulan perempuan Indonesia masa itu juga memperjuangkan kedudukan dan hak perempuan yang relevan dengan perlakuan terhadap perempuan Indonesia pada masa Hindia Belanda.

---

<sup>24</sup> Rosemarie Putnam Tong, *op. cit.*, hal 48-49

<sup>25</sup> Joshua S. Goldstein, *War and Gender*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, hal. 39.

## G. Hipotesis

Dari latar belakang permasalahan dalam Kongres Perempuan Indonesia I (1928) di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

1. Jika terjadi aksi gerakan politik pada masyarakat Indonesia dan terdapat perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam bidang sosial (perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam hukum perkawinan dan kesempatan memperoleh pendidikan, terjadinya poligami dan perkawinan anak usia dini) maka Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22-25 Desember 1928 akan terjadi.
2. Jika peserta Kongres Perempuan Indonesia I dapat mengatasi perbedaan pendapat (pandangan terhadap poligami) maka Kongres Perempuan Indonesia I akan berjalan lancar .
3. Jika peserta Kongres Perempuan Indonesia I (1928) dapat memecahkan masalah-masalah sosial (perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam hukum perkawinan serta kesempatan memperoleh pendidikan, terjadinya poligami dan perkawinan anak usia dini) dan politik (keterlibatan perempuan dalam dunia politik) maka Kongres Perempuan I akan berhasil.

## H. Metode dan Pendekatan Penelitian

### 1. Metodologi

Sejarah sebagai sebuah ilmu juga memiliki cara kerja atau metode yang berfungsi sebagai 'media pembantu' dalam menggali dan menemukan suatu

kebenaran yang lebih obyektif<sup>26</sup>. Dalam mengkaji Kongres Perempuan Indonesia Pertama, penulis menggunakan metode sejarah. Metode sejarah itu merupakan suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau secara imajinatif dari fakta-fakta yang diperoleh melalui proses historiografi. Dalam skripsi ini metodologi penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif analitis.

Deskriptif analitis merupakan pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek pemikiran pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Metode deskriptif analitis memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan yang sebenarnya. Tujuan dari penulisan deskriptif analitis ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode adalah cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode sejarah adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa daripada hasil-hasilnya.<sup>27</sup> Hal ini sangat bermanfaat bagi sejarawan untuk merekonstruksi masa lampau secara imajinatif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui historiografi.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah*, Jakarta, Indonesia University Press, 1975, hal.32.

<sup>27</sup> Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, Jakarta, Yayasan Idayu, 1978, hal. 10-11.

<sup>28</sup> Louis Gottchalk, *op. cit.*, hal. 33.

Adapun tahap-tahap yang digunakan dalam metode penelitian mencakup lima tahapan, yaitu:

**a) Pemilihan Topik.**

Pemilihan topik merupakan salah satu langkah kerja yang pertama yang harus dikerjakan oleh seorang penulis agar apa yang ingin diketengahkan dalam penulisannya menjadi jelas lebih-lebih dimata pembaca sendiri.

Untuk itu diperlukan beberapa kriteria sebagai acuan, yaitu:

1. Topik harus memiliki nilai, yang artinya di sini harus berdasarkan pada pengalaman manusia yang dianggap paling penting terutama peristiwa-peristiwa yang dapat membawa perubahan dalam masyarakat.
2. Topik harus asli yang berarti apa yang ditulis belum pernah ditulis orang lain.
3. Topik harus praktis yang berarti bahwa pemilihan topik di sini apabila dilanjutkan ke penelitian tidak memakan waktu.
4. Topik harus memiliki kesatuan tema dan topik di sini harus berangkat dari suatu permasalahan.

**b) Pengumpulan Sumber (Heuristik).**

Pengumpulan sumber atau heuristik adalah proses pengumpulan data-data dari sumber-sumber yang ada untuk kepentingan subyek yang akan diteliti. Menurut bentuknya, sumber sejarah dibedakan menjadi tiga, yaitu: sumber tertulis, sumber tidak tertulis, dan sumber benda (*artefact*).<sup>29</sup> Menurut sifatnya, sumber sejarah dibedakan menjadi dua yaitu: sumber primer dan

---

<sup>29</sup> Kuntowijoyo, *Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 1995, hal. 94.

sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang disampaikan oleh pelaku maupun saksi mata yang bentuknya bisa tertulis (dokumen) maupun tidak tertulis (artefak dan informan). Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang disampaikan bukan oleh pelaku maupun saksi mata namun disampaikan oleh orang lain yang umumnya tidak sejaman dengan suatu peristiwa. Sumber sekunder bentuknya tertulis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber yang berasal dari buku-buku yang sesuai dengan topik seperti Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia (Suyatin), Kongres Perempuan Pertama: tinjauan ulang (Susan Blackburn), feminisms (Maggi Humm), dan Politik Perdagangan Perempuan (Andy Yentriyani). Sumber-sumber tersebut penulis peroleh melalui perpustakaan Universitas Sanata Dharma, perpustakaan Universitas Gajah Mada, Perpustakaan Kolese ST. Ignatius, perpustakaan daerah Yogyakarta, arsip nasional Indonesia dan berbagai tempat lainnya. Sumber-sumber itu berupa buku-buku pustaka baik yang bersifat primer maupun sekunder.

### **c) Kritik Sumber**

Kritik sumber merupakan tahap penelitian sejarah setelah pengumpulan data. Kritik sumber bertujuan untuk mengetahui kredibilitas dan autentisitas sumber.<sup>30</sup> Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kritik sumber adalah uji terhadap data pada penelitian. Kritik sumber dalam penelitian sejarah merupakan langkah yang harus dilakukan untuk menghindari adanya

---

<sup>30</sup> Louis Gotchalk, *op. cit.*, hal. 95.

kepalsuan suatu sumber atau untuk mengetahui apakah data yang ada dapat dipertanggungjawabkan keasliannya atau tidak. Kritik sumber ada dua macam, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.<sup>31</sup> Tahap membandingkan sumber supaya dapat diketahui keasliannya disebut kritik ekstern. Tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah kritik intern dengan membandingkan sumber supaya diketahui kebenarannya. Kritik intern dilakukan dengan menilai apakah sumber yang digunakan tersebut dapat dipercaya atau tidak.<sup>32</sup> Penulis melakukan kritik sumber dengan cara melihat dan mengkaji apakah sumber tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan bersifat obyektif, sehingga diperoleh data-data yang dapat dipercaya dan relevan. Hasil dari kritik sumber adalah fakta-fakta yang merupakan unsur rekonstruksi sejarah.

#### **d) Interpretasi Data (Analisis Data)**

Analisis sumber atau interpretasi dalam penelitian merupakan tahap yang sangat penting, karena dalam interpretasi terdapat unsur penafsiran terhadap sumber yang telah dinilai kebenarannya. Hasil analisis akan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu penelitian. Dalam penelitian ini data akan ditempatkan secermat mungkin supaya penelitian bisa mendekati keadaan yang sebenarnya. Pengolahan data secermat mungkin diharapkan mampu mengurangi subyektifitas yang biasa muncul dalam historiografi.<sup>33</sup> Sejarah dalam obyek (peristiwa) yang diamati dan dimasukkan kepikiran subyek tidak akan murni tetapi akan murni apabila diberi warna sesuai kacamata subyek,

---

<sup>31</sup> Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, hal. 11.

<sup>32</sup> Kuntowijoyo, *op. cit.*, hal. 99.

<sup>33</sup> Untuk dapat dipelajari secara objektif sesuatu pertamakali harus menjadi suatu objek dan harus mempunyai eksistensi yang merdeka di luar pikiran manusia. Louis Gottchalk, *op. cit.*, hal. 28.

artinya interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta-fakta telah diuji kebenarannya dan menganalisis sumber untuk menghasilkan suatu peristiwa.

#### e) Penulisan Sejarah (Historiografi)

Penulisan sejarah tidak lepas dari sumber-sumber yang terkait didalamnya, yaitu memberi suatu gambaran mengenai rangkaian suatu peristiwa. Dalam penulisan sejarah aspek kronologis suatu peristiwa sangat penting, sehingga dengan mudah memberi suatu pengetahuan dasar kapan peristiwa itu terjadi.

Penulisan sejarah ini dilakukan setelah melalui beberapa kriteria yang telah tercantum dalam metode penulisan sejarah. Metode tersebut antara lain, topik, latar belakang permasalahan, permasalahan, tujuan dari penulisan ini, manfaat penulisan, landasan teori, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian, jadwal penelitian dan sumber yang terakhir yaitu daftar pustaka.<sup>34</sup>

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analitis, yakni model penulisan sejarah yang membutuhkan landasan teoritis atau kerangka konseptual. Masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah latar belakang sosial dan politik diadakannya Kongres Perempuan Indonesia Pertama, pelaksanaan kongres Perempuan Indonesia Pertama, dan hasil dari Kongres Perempuan Pertama.

---

<sup>34</sup> Kuntowijoyo, *op. cit.*, hal. 89.

## 2. Pendekatan

Pendekatan adalah sudut pandang penulis, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan. Yang lazim dilakukan dalam berbagai disiplin ilmu adalah pendekatan unidimensional, yaitu dengan menggunakan konsep-konsep dari disiplin ilmu sendiri. Akan tetapi, sebenarnya pendekatan multidimensional perlu ditampilkan agar gambaran menjadi lebih bulat dan menyeluruh sehingga dapat dihindari kesepihakan.<sup>35</sup>

Pendekatan multidimensional adalah suatu pendekatan yang dalam memaparkan dan menganalisis berbagai peristiwa menggunakan konsep-konsep dari berbagai ilmu sosial yang relevan dengan pokok-pokok kajiannya.<sup>36</sup> Pendekatan multidimensional dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan historis, politik, sosial dan budaya.

### I. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul "Kongres Perempuan Indonesia Pertama (1908)" memiliki sistematika sebagai berikut.

**BAB I** Berupa pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah dengan rumusan masalah. Dalam pendahuluan juga diuraikan tentang tujuan penulisan dan manfaat penulisan makalah.

**BAB II** Memaparkan tentang latar belakang dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia Pertama.

---

<sup>35</sup> Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia, 1992, hal. 4 dan 87.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 72.

BAB III           Memaparkan tentang pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama.

BAB IV           Memaparkan tentang hasil dari Kongres Perempuan Indonesia Pertama.

BAB V           Berupa kesimpulan dari pembahasan Bab I, II, dan III.



## BAB II

### LATAR BELAKANG POLITIK DAN SOSIAL DILAKSANAKANNYA KONGRES PEREMPUAN INDONESIA I

Kebangkitan wanita Indonesia telah dimulai dengan perjuangan pahlawan wanita sekitar tahun 1817, yaitu Martha Christina Tiahahu, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Nyi Ageng Serang, Maria Walanda Maramis, Kartini, Dewi Sartika, Nyi Ahmad Dahlan dan Rasuna Said.<sup>37</sup> Sebelum diadakannya Kongres Perempuan Indonesia I, telah muncul berbagai organisasi perempuan yang memperjuangkan kedudukan perempuan secara sosial. Ruang gerak mereka bermacam-macam, mulai dari mendirikan sekolah-sekolah gadis, sampai pada menerbitkan surat-surat kabar untuk menggerakkan para perempuan agar dapat terus berjuang untuk memperbaiki nasib dan juga agar memiliki bekal untuk menjadi istri yang memiliki keterampilan serta mampu mendidik anak. Seperti yang dikatakan oleh R.A. Kartini bahwa Ibu merupakan sosok yang pertamakali mendidik anak.<sup>38</sup>

Terdapat beberapa jenis Organisasi perempuan yang ada sebelum pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I (1928), yaitu organisasi perempuan yang berafiliasi pada organisasi politik atau pergerakan nasional, organisasi perempuan yang berhaluan agamis dan organisasi perempuan yang memiliki tujuan untuk mengajarkan keahlian khusus putri.<sup>39</sup> Organisasi perempuan yang berafiliasi pada pergerakan nasional antara lain Putri Indonesia, Jong Java bagian perempuan, dan Wanudiyo Utomo. Organisasi yang berhaluan agamis antara lain,

---

<sup>37</sup> Suyatin Kartiwiyo, *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia*, Jakarta, Yayasan Idayu, 1975, hal. 5.

<sup>38</sup> Kongres Wanita Indonesia, *op. cit.*, hal. 8.

<sup>39</sup> Bandingkan dengan pendapat A.K. Pringgodigdo dalam *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* hal. 109-110.

Jong Islamiyeten Bond Dames Afdeeling, Aisyiyah dan Wanita Katolik. Sedangkan yang bertujuan mengajarkan keahlian khusus putri antara lain Wanita Utomo dan Wanita Mulyo.

Terinspirasi dan terdorong oleh semangat Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang lebih dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda, maka atas prakarsa 7 Organisasi Perempuan diadakanlah Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22-25 Desember 1928. Hari pertama dari Kongres tersebut dinobatkan sebagai hari Ibu. Tujuh Organisasi Perempuan itu adalah Wanita Utomo, Wanita Taman Siswa, Putri Indonesia, Aisyiyah, Jong Islamiyeten Bond Bagian perempuan, Wanita Katolik, dan Jong Java bagian perempuan.

Seperti yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi faktor pendorong dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia I adalah keinginan para tokoh pergerakan perempuan untuk memperjuangkan kedudukan perempuan dalam bidang pendidikan, sosial dan kebudayaan.<sup>40</sup> Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I secara tersirat telah menunjukkan adanya unsur politis dalam kongres tersebut walaupun kongres tidak membahas hal-hal yang bernuansa politik.

## **A. Faktor politik**

### **a. Keadaan politik masa Hindia Belanda**

Tahun 1920-an memperlihatkan suatu fenomena yang merujuk pada kebangkitan nasional. Hal ini dibuktikan dengan menjamurnya gerakan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 30.

nasional dan maraknya aksi gerakan politik. Gerakan nasional dan politik tersebut seringkali mendapat perlawanan dari pemerintah kolonial. Walaupun begitu semangat nasional yang tinggi mengakibatkan perlawanan dari pemerintah kolonial tidak berarti apa-apa. Semangat para nasionalis pada saat itu tidak menjadi surut dan padam.<sup>41</sup>

Perlawanan pemerintah kolonial terhadap gerakan nasional pada saat itu justru menjadi cambuk semangat yang semakin tinggi dari masa ke masa. Pada tahun 1920-an ini aktivitas-aktivitas politik digolongkan sebagai aktivitas yang radikal. Dalam sejarah nasional Indonesia telah tercatat berbagai peristiwa penting dalam tahun-tahun ini. Gerakan di Indonesia pada tahun 1920-an terpengaruh oleh gerakan yang terjadi di India yaitu gerakan yang dipelopori oleh Mahatma Gandhi yang dalam gerakannya menganjurkan suatu taktik pergerakan yang dinamakan *non-cooperatif*, tidak bekerjasama dengan pihak penjajah.<sup>42</sup> Gerakan Mahatma Gandhi di India didasarkan atas 2 prinsip, yaitu:

1. Jika suatu Undang-Undang dipandang tidak adil dianjurkan supaya jangan mentaati Undang-Undang itu, ini dinamakan *Civil disobedience*.
2. Tidak mentaati Undang-Undang harus dijalankan dengan cara damai artinya tidak boleh mempergunakan kekerasan. Tindakan ini dinamakan

---

<sup>41</sup> Gagasan untuk menyelenggarakan kongres perempuan nasional tidak turun dari langit biru. Tahun 1920-an memperlihatkan kebangkitan nasionalisme yang cepat berhasil menghimpun kekuatan di tengah masyarakat Indonesia. Di tahun-tahun tersebut terjadi lonjakan-lonjakan dalam aktivitas radikal, yang mengakibatkan terjadinya pemberontakan komunis tahun 1926 dan 1927. ditumpasnya gerakan oleh pemerintah kolonial sama sekali tidak menghentikan semangat nasionalis. Lihat Susan Blackburn, *Kongres Perempuan Pertama*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, *op.cit.*, hal. xxii.

<sup>42</sup> Susanto Tirtoprodjo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, Jakarta, PT. Pembangunan, 1989, hal. 20.

sifat *non-violence* atau dalam bahasa Hindu, *Ahimsa*. Kata-kata *Civil disobedience* dalam bahasa Hindu istilahnya *Satya Graha*.

Pada tahun 1920 organisasi Budi Utomo membicarakan dan merundingkan pendapat Mahatma Gandhi. Dalam perkumpulan Budi Utomo bulan Juli 1923 dimasukkan dalam agenda kongres. Namun pendapat ini ditolak sebab anggota Budi Utomo sebagian besar adalah dari kalangan pegawai pemerintah, mulai dari pegawai pusat sampai daerah.<sup>43</sup> Pada tahun 1926 terbentuk organisasi Pemuda Indonesia. Setahun kemudian (1927) dibentuklah Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada tahun 1928 kedua organisasi politik ini mengadakan kongres. PNI mengadakan kongres pertamanya sedangkan Pemuda Indonesia mengadakan kongres yang kedua kalinya di tahun 1928. Organisasi pemuda Indonesia menjadi terkenal karena kongres keduanya ini sebab mengikrarkan Sumpah Pemuda yang semakin mengukuhkan identitas dan cita-cita nasional.<sup>44</sup>

Organisasi lain yang telah berdiri sebelum tahun 1920-an juga memperlihatkan aktivitas yang tinggi di tahun 1920-an. Organisasi-organisasi itu antara lain, Budi Utomo (1908), Perhimpunan Indonesia (1908), Sarekat Islam (1911), Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (1919), Jong Java (1915), dan Jong Sumatranen Bond (1917). Organisasi Budi Utomo resmi didirikan oleh dr. Sutomo walaupun penggagasnya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Pada tahun 1919 dalam rapat perkumpulan Budi Utomo telah ditetapkan

---

<sup>43</sup> Pada tanggal 2 April 1923 asas non-cooperatif dibicarakan dalam Budi Utomo, namun dikritik dan ditolak oleh golongan tua. Lihat A.K. Pringgodigdo, *op. cit.*, hal. 46.

<sup>44</sup> Kongres ini merupakan puncak integrasi ideologi nasional dan merupakan peristiwa nasional yang belum pernah terjadi. Lihat Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994, hal. 78-80.

bahwa Budi Utomo bukanlah organisasi radikal. Namun dalam tahun 1920-an sikap tenang itu tidak dapat dipertahankan karena aksi golongan muda yang terdapat di dalam organisasi Budi Utomo.

#### b. Aksi Pergerakan Nasional

Pada saat pendirian organisasi Budi Utomo, organisasi ini juga telah menetapkan bahwa tujuan perkumpulan Budi Utomo adalah kemajuan yang selaras (harmonis) untuk negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, peternakan dan dagang, teknik dan industri, kebudayaan (kesenian dan ilmu).<sup>45</sup> Pada tahun 1921 tujuan organisasi Budi Utomo menjadi bercabang tiga, yaitu memajukan pengajaran, mendapatkan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk ikut campur secara nyata dalam pemerintah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan rakyat. Tujuan pada urutan kedua di atas menunjukkan bahwa Budi Utomo mulai menunjukkan aktivitas yang meresahkan pemerintah kolonial Belanda.

Perhimpunan Indonesia juga tidak kalah radikal dengan aksi golongan muda dalam Budi Utomo. Namun perbedaannya Perhimpunan Indonesia sejak pendiriannya pada tahun 1908 di Belanda telah bersifat radikal.<sup>46</sup> Perhimpunan Indonesia didirikan oleh orang-orang Indonesia yang berada di negeri Belanda, antara lain R. N. Suroto. Sejak tahun 1923, PI aktif berjuang

---

<sup>45</sup> A.K. Pringgodigdo, *op. cit.*, hal. 1-2.

<sup>46</sup> Majalah Hindia Poetra bulan Maret 1923 menyebutkan keterangan asas Perhimpunan Indonesia, yaitu mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia yang bertanggungjawab hanya kepada rakyat Indonesia semata-mata, bahwa hal yang sedemikian itu hanya akan dapat dicapai oleh orang Indonesia sendiri bukan dengan pertolongan siapapun juga; bahwa segala jenis perpecahan tenaga haruslah dihindarkan supaya tujuan itu lekas tercapai. <sup>46</sup> Sartono Kartodirjo, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia V*, Jakarta, Balai Pustaka, 1977, hal. 243.

memelopori dari jauh perjuangan kemerdekaan untuk seluruh lapisan rakyat Indonesia dengan berjiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang murni dan kompak. Pada tahun 1924 PI mengubah nama majalahnya dari Hindia Poetra menjadi Indonesia Merdeka.

Perubahan nama majalah PI dari Hindia Poetra menjadi Indonesia Merdeka semakin mempertegas keradikalan PI. Perhimpunan Indonesia membuat manifesto politiknya pada tahun 1925 yang meminta dengan keras bahwa segala lapisan rakyat Indonesia hendaknya ikut campur dalam perjuangan kemerdekaan, melancarkan aksi-aksi radikal untuk mengobarkan semangat rakyat, dan menormalkan keadaan lahir dan batin.

Sarekat Islam dapat dianggap sama haluannya dengan organisasi lainnya sebab organisasi ini menentang kapitalisme yang dianggap merupakan akar dari penjajahan di Indonesia pada saat itu. Para pendiri Sarekat Islam mendirikan organisasinya tidak semata mata untuk mengadakan perlawanan terhadap orang-orang Cina tetapi untuk membuat *front* melawan semua penghinaan terhadap rakyat bumiputera.<sup>47</sup> Pendirian Sarekat Islam juga merupakan reaksi terhadap rencana kristenisasi kaum *Zending*, perlawanan terhadap kecurangan-kecurangan dan penindasan-penindasan *ambtenar-ambtenar* bumiputera dan Eropa. Hal ini berarti bahwa walaupun Sarekat Islam berdiri atas latar belakang ekonomis namun organisasi ini memiliki pola umum yang sama dengan organisasi lainnya, yakni menentang penjajahan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 187.

dalam bentuk apapun. Dengan kata lain Sarekat Islam ditujukan terhadap setiap penindasan dan kesombongan rasial.<sup>48</sup>

Sarekat Islam memiliki tiga aliran, yaitu bersifat Islam fanatik, yang bersifat menentang keras dan golongan yang berusaha mencari kemajuan dengan berangsur-angsur dan dengan bantuan pemerintah. Namun begitu Sarekat Islam tetap bersifat demokratis terhadap semua aliran yang ada asalkan tidak menyimpang dari keadilan terhadap rakyat bumiputera. Atas dasar itulah maka Sarekat Islam dijuluki gerakan nasionalis-demokratis-ekonomis. Itulah sebabnya kecepatan tumbuhnya Sarekat Islam bagaikan meteor dan meluas secara horizontal sehingga Sarekat Islam merupakan organisasi massa yang pertama di Indonesia, yang antara tahun 1917-1920 sangat terasa pengaruhnya dalam politik Indonesia.<sup>49</sup>

Sejak didirikan organisasi Jong Java telah berupaya untuk mengadakan suatu pelatihan bagi calon-calon pemuka nasional. Di awal tahun 1920-an, Jong Java mengadakan kongres hampir setiap tahun, yaitu sejak tahun 1920 sampai tahun 1927. dalam kongres yang ketujuh pada tahun 1926, Jong Java dengan suara bulat menentukan bahwa tujuan organisasi ini dalam memajukan rasa persatuan para anggota dengan semua golongan bangsa Indonesia dan melalui kerjasama dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia

---

<sup>48</sup> Bila ditinjau menurut anggaran dasarnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut: mengembangkan jiwa berdagang, memberi bantuan kepada anggota-anggota yang menderita kesukaran, memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat bumiputera, menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam, maka SI terang tidak berisikan politik. Tetapi dari seluruh aksi perkumpulan itu dapat dilihat bahwa SI tidak lain melaksanakan satu tujuan ketatanegaraan. *Ibid.*, hal. 187.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 188.

lainnya ikut serta dalam menyebarkan dan memperkuat paham Indonesia bersatu.<sup>50</sup>

Kongres Pemuda Indonesia II tanggal 28 Oktober 1928 yang diadakan dua bulan sebelum diadakannya Kongres Perempuan Indonesia I, merupakan suatu peristiwa yang paling berkesan dan mampu “memprovokasi” perwakilan organisasi perempuan yang hadir untuk menggalang persatuan antar perkumpulan-perkumpulan perempuan yang ada pada saat itu. Beberapa perwakilan dari organisasi perempuan maupun yang merupakan afiliasi dari organisasi politik yang hadir pada saat itu antara lain, Suyatin Kartowiyono dari organisasi Jong Java, Wanita Utama sekaligus Putri Indonesia, S. K. Trimurti dari Partai Indonesia, dan Siti Sundari yang juga dari Organisasi Putri Indonesia.

Walaupun sebelum diadakannya Kongres Pemuda Indonesia II di pelbagai daerah perasaan kemerdekaan telah banyak dibayar dengan pengorbanan jiwa dan raga, sebenarnya barulah Sumpah Pemuda yang menegaskan bahwa perjuangan dan pengorbanan itu dilandasi oleh semangat bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu yaitu Indonesia.<sup>51</sup> Suyatin Kartowiyono yang hampir seluruh masa hidupnya dihabiskan dengan berorganisasi dengan menjadi anggota pengurus Jong Java, ketua Putri Indonesia dan juga menjadi anggota Wanita Utama pimpinan Ny. Sukonto sudah pernah mendengar dan mengetahui wacana yang berkembang pada

---

<sup>50</sup> Sebelumnya pada kongres kelima tahun 1922 Jong Java menetapkan untuk tidak akan mencampuri aksi atau propaganda politik . A.K. Pringgodigdo, *op. cit.*, hal. 114.

<sup>51</sup> Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, *Bunga Rampai Soempah Pemoeda*, Jakarta, Balai Pustaka, 1978, hal. 61.

Kongres Pemuda Indonesia yang pertama tahun 1926 tentang semangat satu Negara, satu tanah air dan satu bahasa serta lagu Indonesia Raya. Pada tanggal 28 Oktober 1928 Pemuda Indonesia mengikrarkan wacana itu dengan sebutan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda berhasil menggetarkan semangat juang pemuda-pemuda Indonesia dan memberi penegasan, landasan serta arah dan tujuan perjuangan pada masa itu. Kongres Pemuda Indonesia II atau yang lebih dikenal dengan Sumpah Pemuda ini telah terbukti menjadi suatu klimaks dari kebangkitan nasional. Sumpah Pemuda mampu memberikan inspirasi bagi para pemuda untuk memperjuangkan apa yang hendak mereka perjuangkan.

Walaupun banyak pemuda Indonesia pada saat itu yang tidak bisa ikut dalam Kongres Pemuda Indonesia II, namun gema Sumpah Pemuda terdengar di telinga hampir seluruh pemuda Indonesia. Kongres Pemuda Indonesia II juga telah membantu mengembangkan wacana mengenai emansipasi perempuan Indonesia. Bahder Johan, seorang pelajar Stovia pada saat itu mengangkat wacana dan memberi saran seputar kedudukan perempuan dalam masyarakat Indonesia. Bahder Johan menyarankan adanya emansipasi perempuan Indonesia. Saran itu disambut hangat oleh seorang gadis minahasa, yakni Cindi Adams.<sup>52</sup>

Meskipun fokus aktivitas politik tetap ada pada organisasi pergerakan nasional, namun lewat saluran-saluran lain dilancarkan pelbagai aksi, seperti aksi pemogokan serikat sekerja dan serikat buruh, protes, deklarasi dan lain

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 46.

sebagainya. Di samping itu bermunculan aktivitas di bidang ekonomi, social dan budaya, seperti pendirian koperasi, sekolah-sekolah, kursus-kursus, dan pusat pelatihan kesenian. Mulai disadari pada saat itu bahwa semua bidang kegiatan itu menjadi saluran yang berfungsi sangat instrumental untuk meningkatkan kesadaran nasional pada umumnya dan kesadaran politik khususnya. Perkembangan dari tahun ke tahun sejak 1918 menunjukkan kecenderungan ke arah orientasi radikal.<sup>53</sup>

Ada beberapa faktor yang menyebabkan radikalisasi, yaitu:

1. Dalam bidang politik di Eropa dampak pergolakan politik pasca Perang Dunia I di Eropa pada umumnya dan di negeri Belanda pada khususnya. Revolusi Oktober 1917 di Rusia yang disusul oleh gerakan revolusioner kaum sosial-demokrat Belanda yang dipimpin oleh Troelstra memberi inspirasi kepada unsur-unsur progresif di Indonesia yang tergabung dalam ISDV untuk menuntut pemerintahan sendiri dan perwakilan dengan hak-hak yang luas. Pidato Van Limburg Stirum pada 18 November 1918 memberi angin kepada semangat revolusioner itu.
2. Di bidang sosial ekonomi, Perang Dunia I mengakibatkan kemacetan pengangkutan hasil perkebunan sehingga pengusaha perkebunan megurangi produksinya dengan akibat rakyat banyak kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Penderitaan rakyat bertambah besar terlebih karena Gubernemen membebankan pajak yang lebih berat kepada rakyat. Kalau sejak 1920 ekonomi membaik karena produk perkebunan mendapat

---

<sup>53</sup> Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jakarta, Gramedia, 1990, hal. 144-145.

pasaran yang baik sekali, kebijaksanaan Gubernemen lebih condong membiarkan pengusaha yang memungut sebagian besar keuntungannya, sedangkan rakyat tetap ditekan dengan beban pajak serta hidup dalam kondisi yang merana.

3. Proses politisasi lewat organisasi, kongres, media, massa memperoleh rangsangan dari proses memburuknya kondisi sosial ekonomi rakyat. Lewat garis organisasi serikat buruh dan serikat sekerja ada kesempatan untuk memobilisasi rakyat tingkat bawah, karena statusnya sebagai komponen sangat fungsional dalam system produksi ekonomi kolonial. Sesuai dengan struktur ekonomi dualistisnya, ekonomi perkebunan sebagai tulang punggung politik eksploitasi daerah jajahan tetap menuntut tenaga kerja yang murah sehingga dalam situasi ekonomi bagaimanapun juga kepentingan kaum pengusaha perlu dijamin sedangkan kaum buruh sebanyak-banyaknya ditekan.
4. Bertolak dari prinsip kepentingan bahwa kepentingan kaum modal perlu dilindungi maka politik kolonial yang dijalankan oleh GJ. Fock mau tidak mau bersifat revolusioner dalam menghadapi aliran-aliran politik serta segala manifestasinya seperti yang direalisasikan dalam organisasi-organisasi pergerakan nasional. Adalah suatu proses yang wajar apabila dalam hubungan yang penuh konflik kepentingan itu timbul peningkatan sikap reaksioner pada satu pihak dan radikalisme di pihak lain.
5. Memburuknya kondisi hidup pada umumnya dan kondisi kaum buruh khususnya menciptakan iklim yang penuh kegelisahan serta keresahan di

kalangan rakyat sehingga ada kecenderungan kuat mengikuti himbauan para pemimpin untuk melakukan aksi-aksi, antara lain pemogokan. Sudah barang tentu pemimpin-pemimpin radikal dari ISDV, VSTP, dan PKI, sangat aktif dalam propagandanya untuk melakukan perjuangan melawan kapitalisme dan imperialisme. Secara terus menerus mereka berusaha membawa dampak yang luas dalam arena politik sehingga politisasi masyarakat semakin meningkat. Komunikasi politik yang semakin konflik perebutan pengaruh atau kekuasaan tidak hanya menjernihkan kedudukan dan identitas politik masing-masing tetapi juga memperdalam kesadaran nasional pada rakyat umumnya. Mungkin konflik-konflik antarorganisasi sangat *counter productive* dalam menghadapi rezim kolonial, namun untuk jangka panjang pencarian identitas nasional semakin mengarah.<sup>54</sup>

Dalam menghadapi aksi-aksi yang dilancarkan oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional yang semakin gencar dan radikal itu, pemerintah kolonial merasa semakin terancam kedudukan serta otoritasnya sehingga tidak segan melakukan tindakan tegas terhadap aksi-aksi tersebut. Sejak semula pemerintah kolonial menghadapi pertumbuhan organisasi pergerakan nasional dengan perasaan curiga. Hal ini disebabkan karena organisasi nasional itu tidak saja merupakan manifestasi dari solidaritas tetapi juga memiliki potensi menghimpun pengaruh yang lama kelamaan dapat berfungsi sebagai pusat kekuasaan suatu factor yang dapat mengancam kedudukan colonial. Dalam hal ini pemerintah kolonial mengalami suatu

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 145-146.

dilema, pada satu pihak tidak dapat melarang keinginan berhimpun dan berkumpul, pada pihak lain perkembangan ke arah pembentukan kekuasaan tidak dapat dicegah.<sup>55</sup>

c. Kemunculan dan Aksi organisasi politik perempuan Indonesia

Gerakan perempuan juga tidak ketinggalan untuk mengukuhkan dan mempererat persatuan antar perkumpulan. Kecenderungan itu tidak hanya terlihat di Jawa namun juga di Sumatera. Gerakan perempuan di tahun 1920-an ini didorong oleh PNI untuk membuat Federasi Perempuan Nasional Indonesia. Usul tersebut ditindaklanjuti oleh Persatuan Putri Indonesia dalam pertemuan pada bulan September 1928. Pada tahun 1926 telah terbentuk federasi perempuan Sumatera Barat yang memiliki majalah bulanan sendiri dalam bahasa Melayu.

Kongres Perempuan Indonesia I (1928), merupakan bagian tak terpisahkan dari semangat yang sama. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan Ny. Suyatin sebagai penggagas ide dari Kongres Perempuan Indonesia I merasa bahwa kaum wanita harus dibangkitkan dari keadaan yang masih agak pasif dan diberi semangat nasional. Ide ini diusungnya di organisasi Putri Indonesia dan pada suatu waktu disepakati oleh organisasi Putri Indonesia untuk mengadakan suatu pertemuan antar kaum perempuan. Gagasan ini dibawa pula kepada beberapa pemimpin pergerakan nasional seperti Ki Hajar dan Nyi. Hajar Dewantara, Dr. Soekiman, dan Ny. Soekonto.<sup>56</sup> Mereka menyetujui usul dari Ny. Suyatin dan Putri Indonesia. Dr. Soekiman memberikan bantuan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 147.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 73.

moral, Ny. Soekonto bersedia menjadi ketua dan Nyi. Hajar Dewantara bersedia masuk ke dalam kepanitiaan.

Walaupun Kongres Perempuan Indonesia tidak mengusung masalah politik namun dengan mengharuskan penggunaan bahasa Melayu dan menggunakan identitas sebagai bangsa Indonesia maka Kongres Perempuan Indonesia ini menunjukkan adanya motif politik secara tidak langsung. Hal ini wajar sebab dalam perjuangan pergerakan perempuan pada masa itu meliputi dua hal, yaitu:

1. Berjuang bersama-sama kaum pria menuju cita-cita kemerdekaan.
2. Meningkatkan kedudukan wanita dalam bidang pendidikan, sosial dan kebudayaan.

Kedua hal inilah yang tetap dijadikan asas dalam setiap kongres yang diadakan . Pada saat Kongres Perempuan Indonesia I (1928), terdapat seorang perwakilan dari Putri Indonesia yaitu Siti Sundari yang menyelipkan gagasan-gagasan politik dalam pidatonya. Hal ini terlihat dari penggunaan sebutan bagi kaum perempuan yakni “Putri Indonesia.”

## **B. Faktor Sosial**

### **a. Keadaan Perempuan Indonesia**

Sudah menjadi hal yang lumrah di dunia bahwa kaum perempuan selalu dimarginalkan. Di Indonesia hal serupa terjadi. Perempuan mendapat porsi kecil dalam setiap aspek kehidupan. Sekolah hanya diperuntukkan bagi keturunan bangsawan. Walaupun sama-sama merupakan keturunan

bangsawan namun antara perempuan dan laki-laki terdapat perbedaan dalam mengakses pendidikan.

Dalam perkawinan perempuan hanya ditempatkan di dapur untuk memasak, mengurus anak dan suami. Perempuan hanya dipandang sebagai pelengkap kehidupan saja bukan sebagai *partner*. Rendahnya pandangan dan perlakuan terhadap perempuan mengakibatkan banyak terjadi perdagangan perempuan, perceraian sepihak, poligami, dan juga rendahnya pendidikan perempuan. Bahkan banyak sekali perempuan di masa itu yang masih buta huruf sebab pendidikan hanya dapat diakses oleh keturunan bangsawan saja.<sup>57</sup>

Dalam banyak kasus terbukti bahwa rendahnya tingkat pendidikan perempuan disebabkan oleh adanya kebiasaan untuk menikahkan anak pada usia sekitar 10-12 tahun. Apabila pada usia di bawah 10 tahun anak diperbolehkan bersekolah namun pada saat anak perempuan beranjak ke usia 10 tahun mereka dilarang sekolah. Perkawinan pada anak di bawah umur ini merupakan pola umum yang terjadi pada semua lapisan mulai dari bangsawan sampai pada rakyat jelata.

Permasalahan kekerasan terhadap anak pun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ketertindasan perempuan. Kekerasan terhadap anak pada saat itu berupa perdagangan anak dan perkawinan anak-anak (masih belum cukup umur). Di wilayah Jawa seringkali terjadi perkawinan remaja atau anak yang masih di bawah umur. Pada masa Hindia Belanda praktik perkawinan anak di

---

<sup>57</sup> Bandingkan dengan pendapat A.K. Pringgodigdo dalam *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, hal. 22.

bawah umur sangat tinggi terutama di wilayah Jawa Barat.<sup>58</sup> Meluasnya adat kebiasaan ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, yaitu karena keinginan mendapat menantu sebagai tenaga pembantu dalam mengerjakan sawah atau ladang, mengadakan pesta secara gotong royong, dan rasa malu apabila anak gadis tidak bersuami.<sup>59</sup> Perceraian sepihak oleh suami juga sering terjadi pada masa itu. Istri yang diceraikan secara sepihak oleh suaminya di beberapa tempat seperti Aceh istri seringkali tidak mendapatkan warisan ataupun pembagian harta dari suaminya kecuali selama perkawinan mereka memiliki banyak harta atau dengan kata lain amat kaya.<sup>60</sup> Perceraian dalam hukum Islam sifatnya fiqh.<sup>61</sup> Dalam menjatuhkan talak terdapat beberapa pendapat, antara lain:

1. Menjatuhkan talak cukup dengan ucapan yang terang dan dapat diucapkan suami kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun.
2. Talak boleh (sah) dijatuhkan dengan kata sindiran asal diniatkan untuk menjatuhkan talak.
3. Talak hanya sah apabila dijatuhkan di depan hakim.

Oleh karena itu ketika Undang-undang perkawinan belum lahir dan berlaku kaum pria yang biasa kawin cerai akan sepenuh hati mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa talak dapat (sah) dijatuhkan dalam keadaan

---

<sup>58</sup> Hal ini berdasarkan laporan Mindere Welfaart Onderzoek. Maria Ulfah Subadio dan Ny. T.O. Ihromi, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 1978, hal. 152-153.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 151.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 193.

<sup>61</sup> Hukum fiqh sifatnya relatif, boleh diubah menurut situasi, tempat dan waktu, karena hal ini merupakan hasil pendapat para ulama ketika menerapkan syariat dalam masyarakat konkret. Sri Widowati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta, LP3S, 1983, hal. 54.

bagaimanapun, di manapun, kapanpun dan dengan cara apapun. Akhirnya pada waktu dulu banyak terjadi talak dalam masyarakat kita, sebab talak begitu mudah dijatuhkan.<sup>62</sup>

b. Kemunculan gerakan perseorangan dan organisasi sosial perempuan Indonesia

Terlepas dari keinginan para tokoh perintis Kongres Perempuan Indonesia I, masalah-masalah yang telah dibahas di atas memberikan inspirasi untuk mengadakan perkumpulan akbar antar organisasi perempuan untuk bersama-sama membicarakan dan mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Adapun maksud dan tujuan dari Kongres Perempuan Indonesia I adalah:

1. Membangun dan mempererat kerja sama antara perkumpulan-perkumpulan perempuan Indonesia.
2. Dapat bersama-sama membicarakan masalah kewajiban, keperluan, dan kemajuan perempuan.

Jauh sebelum diadakannya Kongres Perempuan Indonesia I, yang menjadi embrio dari pelaksanaan Kongres tersebut adalah kesadaran perintis organisasi wanita untuk memperjuangkan nasib perempuan Indonesia seperti R.A. Kartini dan Dewi Sartika. Berkat kepeloporan R. A. Kartini maka dikemudian hari didirikanlah perkumpulan wanita yang memperjuangkan terwujudnya ide-ide Kartini, seperti Putri Mardika di Jakarta (1912), Wanita Adi di Jepara ( 1915), Wanita Susila di Pematang (1915), Pawiyatan Wanita di

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 54.

Magelang (1915), dan lain sebagainya.<sup>63</sup> Sebelum tahun 1928, terdapat 16 organisasi perempuan yang telah berdiri.<sup>64</sup>

Aksi untuk merubah keadaan perempuan di Indonesia diawali oleh gerakan perseorangan. Aksi ini pertamakali dirintis oleh Kartini. Perjuangannya yang telah dipengaruhi oleh politik etis, sadar bahwa ternyata kaumnya masih sangat terbelakang dan terkungkung dalam budaya feodalisme.<sup>65</sup> Usahnya yang pertama adalah mendirikan sebuah kelas kecil bagi kepentingan gadis-gadis yang diselenggarakan empat minggu sekali. Murid-muridnya yang pertama berjumlah tujuh orang dan mendapat pelajaran membaca menulis, kerajinan tangan, masak memasak, dan menjahit. Sampai batas tertentu pengajaran itu diberikan dengan Cuma-Cuma.<sup>66</sup> Kepedulian Kartini terhadap kaum perempuan yang diwujudkan dalam tindakannya itu mendapat banyak apresiasi dari berbagai kalangan dikemudian hari. Dalam majalah triwulanan New York City, *Signs-Journal of Women in Cultural and Society* Kartini diakui sebagai intelektual modern yang pertama. Karena itu juga Kartini disebut sebagai *Pioneer for the rights of women and of and race oppressed race generally* (pelopor hak-hak wanita dan ras tertindas umumnya).<sup>67</sup> Pikiran-pikiran Kartini untuk mengadakan perubahan dalam hubungan antara bangsa Indonesia dengan penguasa kolonial Belanda mendahului pergerakan nasional paling sedikit sepuluh tahun. Di Jawa barat usaha yang sama dirintis oleh Dewi Sartika. Pada tahun 1904 berdiri pula

---

<sup>63</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 I*, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hal. 54.

<sup>64</sup> Lihat, lampiran no. 1, hal. 98.

<sup>65</sup> Hikmah Diniah, *Gerwani Bukan PKI*, Yogyakarta, Penerbit CarasvatiBooks, 2007, hal. 4.

<sup>66</sup> Sartono Kartodirjo, dkk, *op. cit.*, hal. 243.

<sup>67</sup> Sri Widowati Wiratmo Soekito, *op. cit.*, hal. 63.

sekolah yang diberi nama sekolah istri kemudian berganti nama menjadi sekolah keutamaan istri. Sekolahnya tersebar di pelbagai kabupaten dan pada tahun 1912 ada 9 sekolah gadis yang berarti 50% dari seluruh jumlah sekolah di Pasundan pada masa itu.

Peningkatan derajat perempuan merupakan salah satu pokok dalam masalah kesejahteraan umum perkembangan kecerdasan penduduk Indonesia tidaklah begitu kuat dan cepat apabila pendidikan bagi kaum perempuannya diabaikan. Di segala jaman kemajuan perempuan merupakan faktor yang nyata bagi perkembangan budaya suatu bangsa. Dalam jangkauan pandangan itulah dimulai tingkat kedua gerakan perempuan Indonesia yang diawali dengan berdirinya sebuah perkumpulan Putri Mardika di Jakarta pada tahun 1912. Tujuan didirikannya Putri Mardika adalah untuk mencari bantuan keuangan bagi gadis-gadis yang ingin melanjutkan pelajaran. Di samping itu juga memberi penerangan dan nasehat yang baik bagi kaum putri.<sup>68</sup> Pada tahun yang sama atas prakarsa C.Th. Van Deventer dan istrinya didirikan perkumpulan *Kartinifonds*. Sekolahnya yang pertama didirikan di Semarang pada tahun 1913. di kemudian hari sekolah ini juga tersebar di Jakarta, Malang, Madiun, dan Bogor.<sup>69</sup>

Pada tahun 1914, Rohana Kudus mendirikan Kerajinan Amai Setia di kota Gadang Sumatera Barat. Sekolah ini bertujuan untuk meninggikan derajat perempuan dengan pelajaran menulis, berhitung, membaca, mengatur rumah tangga, membuat kerajinan tangan dan mengatur pemasarannya. Di Padang

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 244-245.

<sup>69</sup> Lihat A.K. Pringgodigdo, *op. cit.*, hal. 20.

Panjang juga berdiri Keutamaan Istri yang bertujuan menyebarluaskan pengetahuan umum. Di Bukittinggi berdiri Serikat Kaum Ibu Sumatera.

Seperti terlihat dalam penjelasan di atas diantara ketujuh organisasi perintis Kongres Perempuan Indonesia I terdapat beberapa organisasi perempuan yang merupakan bagian dari organisasi Induk, misalnya Aisyiyah (Wanita Muhammadiyah), Puteri Indonesia (Wanita dari Pemuda Indonesia), Perhimpunan Pemuda Islam, SI bagian Wanita, dan Wanita Taman Siswa (Taman Siswa). Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perempuan pada saat itu sudah memiliki kesadaran untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, namun yang menjadi tujuan utama Kongres Perempuan Indonesia I mengkhhususkan pada kemajuan perempuan dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya.<sup>70</sup>

Sesuatu yang aneh apabila dilihat sepintas bahwa Kongres Perempuan Indonesia Pertama, tidak bertujuan politis. Pada saat itu Pergerakan Nasional sedang marak-maraknya berusaha mewujudkan Indonesia merdeka. Peserta dan panitia kongres juga sebagian berasal dari organisasi politik. Apalagi mereka yang merupakan perintis kongres adalah orang-orang yang hadir dalam Kongres pemuda Indonesia II (Sumpah Pemuda). Namun dari kejanggalan-kejanggalan tersebut terdapat jawaban tersirat. Pada saat itu pemerintah Hindia Belanda memberikan *ordonansi* (larangan) bagi organisasi politik.

---

<sup>70</sup> Lihat Suhartono, *op. cit.*, hal. 102-103, bandingkan dengan A.K. Pringgodigdo, *op. cit.*, hal .99.

Dengan demikian dengan mengusung masalah sosial, diharapkan tidak terdapat kecurigaan dari pemerintah kolonial Belanda. Sesuatu yang penting dari kongres itu adalah persatuan diantara organisasi perempuan. Dengan bersatu mereka dapat berjuang bersama untuk mewujudkan cita-citanya. Tanpa diakuinya perempuan dalam masyarakat tidak mungkin perempuan dapat andil dalam perjuangan bangsa. Dengan mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I maka mereka telah memulai untuk diakui keterlibatannya dalam setiap perubahan. Oleh karena itu sebagai langkah pertama mereka harus menyetarakan kembali kedudukan perempuan dengan kaum laki-laki terlebih dahulu, barulah kemudian andil dalam perjuangan bangsa. Sebab pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu sejajar. perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan seharusnya tidak membedakan pandangan, kedudukan serta hak mereka dalam masyarakat.

Gender hanyalah merupakan seperangkat karakter dan perilaku tertentu yang diharapkan dimiliki seseorang berdasarkan jenis kelamin (seks) oleh masyarakat sekitarnya.<sup>71</sup> Tekad itu terbukti setelah beranjak dari Kongres Perempuan Indonesia I, mereka mengadakan kongres berkali-kali setelahnya yang berhaluan politik hingga pada saat berganti nama menjadi Kongres Wanita Indonesia, dan lahirnya Gerwani yang melancarkan gerakan emansipasi perempuan Indonesia terbesar.

Pembahasan di atas menyatakan hipotesis terbukti. Adanya perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam bidang social yang

---

<sup>71</sup> Andy Yentriyani, *op. cit.*, hal. 12.

menyangkut perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam hukum (perkawinan) dan kesempatan memperoleh pendidikan, terjadinya poligami dan perkawinan anak usia dini dan maraknya aksi pergerakan nasional menjadi latar belakang sosial dan politik diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia I.



## BAB III

### PELAKSANAAN KONGRES PEREMPUAN INDONESIA I

Pasca berlangsungnya Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 di Jakarta yang diikuti pula oleh kaum perempuan, memacu mereka untuk segera menentukan langkah. Wanita Utomo yang diwakili Ny. Soekonto, bersama Wanita Taman Siswa yang diwakili Nyi Hadjar Dewantara Serta R.A. Soejatien yang mewakili Puteri Indonesia Mataram, mengawali gagasan dan inisiatif ke arah Kongres Perempuan Indonesia I sebagai representasi dari keinginan untuk dapat berkumpul dan bekerjasama dengan berbagai perkumpulan perempuan. Hanya berselang beberapa bulan setelah ikrar sumpah pemuda dibacakan oleh para pemuda di tahun 1928, kaum aktivis perempuan menyelenggarakan suatu kongres perempuan yang pertama di Yogyakarta.<sup>72</sup>

#### A. Latar belakang sosial, politik dan pendidikan tokoh Kongres Perempuan Indonesia I

Terdapat beberapa tokoh pergerakan perempuan yang berjasa dalam pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 22-25 Desember 1928. Tokoh-tokoh itu adalah Ny. Soekonto dari Wanita Oetomo, Nyi Hadjar Dewantara dari Taman Siswa, R.A. Soejatien dari Puteri Indonesia Mataram, dan Nn. Sunaryati yang juga perwakilan dari

---

<sup>72</sup> Susan Blackburn, *op. cit.*, hal. Xi.

Puteri Indonesia. Tiga orang pertama yang disebutkan di atas merupakan perintis Kongres Perempuan Indonesia I. Sedangkan Nn. Sunaryati merupakan juru tulis dan sekaligus sebagai panitia inti yang mengundang perkumpulan-perkumpulan perempuan lainnya di Yogyakarta untuk bersama-sama menghadiri pertemuan pertama.

a) Ny. Soekonto

Ny. Soekonto merupakan anak dari bangsawan rendah yang bekerja pada dinas sipil pemerintah kolonial. Ny. Soekonto memiliki nama kecil, yaitu Siti Aminah. Ayahnya bernama R. Ng. Doerjad Sastroamidjojo sedang ibunya Kustiyah. Ny. Soekonto memiliki kakak yang notabene seorang nasionalis, yaitu Ali Sastroamidjojo. Pada tahun 1920-an Ali sudah berkecimpung dalam Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda dan karena keterlibatannya itu beliau pernah dipenjara selama enam bulan. Setelah keluar dari penjara pada tahun 1928, Ali pulang ke Indonesia bersama dengan istrinya dan bergabung dalam Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Soekarno.

Berbeda dengan kakaknya Ali Sastroamidjojo, Ny. Soekonto sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal dan dikenal lebih konservatif dari kakaknya.<sup>73</sup> Baru setelah menikah dengan seorang dokter bernama Soekonto beliau belajar membaca dan menulis aksara latin.<sup>74</sup> Pada saat itu pemerintah kolonial Belanda mengharuskan setiap pegawai pemerintah termasuk dokter

---

<sup>73</sup> Pada waktu Siti Aminah (R.A. Soekonto) masih kecil pada umumnya orang berpendapat bahwa anak perempuan cukup diberi pendidikan di rumah saja yaitu mengaji, sembahyang, membaca *Al-Qur'an* dan juga membaca serta menulis huruf Jawa.

<sup>74</sup> G.A. Ohorella, dkk, *Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama*, Jakarta, Depdiknas, 1991, hal. 5.

mau ditempatkan di mana saja untuk melaksanakan tugas. Oleh karena itu Ny. Soekonto mengenal banyak tempat dan kehidupan perempuan di luar Yogyakarta. Setelah mengikuti tugas suaminya di Yogyakarta beliau bergabung dalam organisasi Wanita Oetomo yang dibentuk pada tahun 1921 di Yogyakarta oleh temannya, R.A. Bintang Abdulkadir.

Ny. Soekonto dikenal sebagai sosok yang diplomatis, ramah dan mampu bekerjasama dengan baik. Beliau selalu menghadapi masalah dengan kepala dingin. Oleh karena itulah beliau diangkat menjadi ketua panitia Kongres Perempuan Indonesia I.

b) Nyi. Hadjar Dewantara

Nyi. Hadjar Dewantara dilahirkan pada Selasa, 14 September 1890, bertepatan dengan 1 Sapar tahun Ehe 1890 di Yogyakarta. Ia lahir sebagai puteri ke-6 dari Kanjeng pangeran Haryo (KPH) Sasraningrat dengan nama Raden Ajeng Sutartinah. Ibunya bernama R. Ay. Mudmainnah yang sudah bersuami disebut B.R. Ay. Sasraningrat. KPH Sasraningrat adalah putera KPAA Paku Alam III. Sedang R. Ay. Mudmainnah adalah puteri KRT Mertonegoro II.<sup>75</sup> Nyi Hadjar Dewantara yang bernama kecil Soetartinah Sasraningrat dibesarkan di Yogyakarta. Kebangsawanan beliau semakin diperkokoh setelah menikah dengan sepupunya, yaitu Soewardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan Ki Hadjar Dewantara.<sup>76</sup> Ki Hadjar Dewantara merupakan seorang nasionalis terkenal yang juga pernah dibuang ke negeri Belanda pada tahun 1913 karena aktivitas politiknya. Ketika mengikuti

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 73.

<sup>76</sup> R.M. Suwardi Suryaningrat adalah putera KPH. Suryaningrat. KPH. Suryaningrat adalah saudara KPH. Sasraningrat dan putera KPAA Paku Alam III.

suaminya di negeri “pembuangan”, Nyi. Hadjar Dewantara belajar menjadi guru.

Setelah pulang dari Belanda beliau bersama suaminya mendirikan sistem pendidikan nasionalis independen di Yogyakarta yang diberi nama Taman Siswa. Sejak itu pula mereka mengganti nama menjadi Ki dan Nyi Hadjar Dewantara. Pada tahun 1922, Nyi Hadjar Dewantara mendirikan organisasi Wanita Taman Siswa yang beranggotakan guru-guru perempuan yang tergabung dalam sistem pendidikan Taman Siswa. Tujuan utamanya adalah untuk melatih para guru perempuan Taman Siswa agar ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini memiliki dasar filosofi yang berakar kuat dalam filsafat Jawa. Namun demikian mereka mampu berafiliasi dengan gerakan nasionalis maupun gerakan nonpolitik. Sehingga Ki Hadjar Dewantoro pun memberikan dukungan dengan diadakannya Kongres Perempuan Indonesia I pada tahun 1928.

c) R.A. Soejatin

Soejatin lahir di desa Kalimenur Kabupaten Wates, 9 Mei 1907. Ayahnya bernama Mahmoed Djojodirono, anak bupati pertama Mojokerto. Ibunya bernama R.A. Kiswari cucu Sumonegoro, bupati Ngawi. Djojodirono adalah seorang pegawai *Staatspoorwagen* (SS), pada zaman Hindia Belanda. Sebagai pegawai SS (jawatan kereta api) Djojodirono dengan keluarganya sering berpindah tempat. Ketika Soejatin berumur kurang lebih enam tahun

ayahnya dipindahkan ke Sumpyuh. Soejatin adalah anak keempat dari lima bersaudara.<sup>77</sup>

R. A. Soejatin merupakan pengagum Ki Hadjar Dewantara dan Soekarno. Ketika masih menjadi pelajar di Yogyakarta R.A. Soejatien telah bergabung dengan Jong java.<sup>78</sup> Pada saat mengambil inisiatif untuk mengadakan Kongres Perempuan Indoenaesia I, R. A. Soejatien telah berstatus sebagai guru swasta di salah satu sekolah di Yogyakarta. Sama seperti Ny. Soekonto R.A. Soejatien juga merupakan anak dari priyayi rendahan yang bekerja pada dinas sipil pemerintah kolonial di Jawa Tengah.

Pada tahun 1926, R.A. Soejatien bersama dengan beberapa guru lain mendirikan organisasi Poetri Indonesia cabang Yogyakarta dan ia diangkat menjadi ketua. R.A. Soejatien dikenal sebagai seorang yang memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. R.A. Soejatien menolak segala sesuatu yang berbau feodal bahkan bersikeras untuk menggunakan bahasa Indonesia termasuk dengan bangsawan Jawa.<sup>79</sup> Latar belakang kegiatan politiknya dan hubungan eratnya dengan beberapa nasionalis dan para perempuan muda membuatnya mampu menyelenggarakan kongres yang cukup banyak menyita waktunya.

---

<sup>77</sup> G.A. Ohorella, dkk, *op. cit.*, hal. 60.

<sup>78</sup> Sujatin juga aktif menulis di majalah Jong java dengan nama samaran Garbera dan kemudian diangkat menjadi redaktornya. Melalui majalah tersebut Sujatin mencoba menyatakan ide-idenya yaitu menuntut keadilan bagi kaum wanita.

<sup>79</sup> Dengan latar belakang keluarga dan organisasi yang dijalankannya maka menjadi wajar apabila R.A. Sujatin memiliki rasa kebangsaan yang tinggi.

## B. Peran tokoh gerakan perempuan dalam Kongres Perempuan Indonesia I

Di dalam Kongres Ny. Soekonto selaku ketua kongres mengemukakan pidatonya, antara lain bahwa kaum istri hendaknya mengikuti tuntutan zamannya.<sup>80</sup> Pada saat itu ia menegaskan bahwa sudah saatnya kaum istri diangkat derajatnya sehingga mereka tidak terpaksa “duduk” di dapur saja. Selain bekerja di dapur kaum istri juga harus memikirkan apa yang menjadi perjuangan kaum laki-laki. Dengan memikirkan perjuangan kaum laki-laki itu tidak berarti bahwa perempuan menjadi “kaum laki-laki”. Perempuan tetap pada kodratnya yang derajatnya sama dengan kaum laki-laki dalam kehidupan bersama.

Dengan tujuan yang sama Siti Mundjiah yang mewakili perkumpulan Aisyiyah juga mengemukakan pidatonya berjudul “Derajat Perempuan”. Dalam pidatonya ia menyampaikan bahwa derap perjuangan telah menggema dalam hati kaum perempuan Indonesia dan sudah waktunya kaum perempuan mulai maju. Dikatakannya pula bahwa telah lama Aisyiyah memikirkan pertemuan seperti itu untuk membicarakan kepentingan bersama. Pada dasarnya perempuan dan laki-laki itu sama, yang berbeda adalah kodratnya.<sup>81</sup>

Perempuan Indonesia haruslah secepatnya mencari ilmu dan jangan takut pada

---

<sup>80</sup> Di masa kecilnya R.A. Sukonto mengalami sendiri diskriminasi terhadap perempuan. Beliau tidak pernah mengenyam sekolah formal. Belajar membaca dan menulis huruf latin baru dipelajarinya setelah menikah.

<sup>81</sup> Siti Mundjiah memiliki pandangan bahwa dalam memperjuangkan derajat perempuan tidak harus berperilaku dan berpenampilan seperti laki-laki. Siti Mundjiah menyayangkan kemajuan perempuan yang dianggapnya melawan kodrat. Pandangannya ini bertentangan dengan pemikiran feminis liberal di Eropa.

usia yang telah lanjut dan tantangan yang berbahaya. Harulah berhati teguh dan terus berusaha agar tidak menjadi bangsa yang rendah dan miskin.<sup>82</sup>

R. A. Soejatien juga banyak memberikan sumbangsih pikiran dan tenaga dalam persiapan sampai pada pelaksanaan kongres. R.A. Soejatien mengitari kota Yogyakarta menggunakan sepeda untuk mencari meja-meja yang diperlukan untuk kongres. Nyi. Hadjar Dewantara juga menyumbangkan pikirannya ke dalam pidato yang kemukakan dalam kongres yang menyangkut masalah kearifan lokal dalam memperjuangkan kedudukan perempuan.

Bukan perkara mudah mengatur pertemuan yang sekian besarnya, apalagi bagi perempuan yang belum berpengalaman . Bagi peserta yang datang dari luar kota namun tidak punya cukup uang untuk menyewa penginapan, panitia kongres menempatkan mereka di rumah kerabat mereka di Yogyakarta atau di rumah kerabat panitia yang dapat menerima tamu. Walaupun dengan persiapan yang terkesan kurang matang, R.A. Soekonto, Nyi. Hadjar Dewantara, dan R.A. Soejatien telah berhasil menyelenggarakan Kongres yang tergolong berhasil, sebab walaupun merupakan yang pertamakalinya tetapi mendapat perhatian yang besar dari berbagai kalangan baik dari organisasi wanita, maupun organisasi yang anggotanya laki-laki. Bahkan pemerintah kolonial walaupun dengan alasan yang bersifat politis memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I.

---

<sup>82</sup> G. Moedjanto *op. cit.*, hal. 20.

### C. Persiapan Kongres Perempuan Indonesia I

Setelah terjadi kesepakatan antara R.A. Soekonto, Nyi. Hadjar Dewantara, dan R.A. Soedjatien untuk mengadakan pertemuan akbar antar perkumpulan perempuan Indonesia maka dengan bantuan Nn. Soenarjati sebagai juru tulis dan sekaligus sebagai panitia inti, mereka mengundang perkumpulan-perkumpulan perempuan wanita lainnya di Yogyakarta untuk menghadiri pertemuan I.<sup>83</sup> Dengan didukung oleh 4 perkumpulan lainnya maka dibentuklah suatu komite yang akan bekerja keras untuk mewujudkan pertemuan organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Komite ini bertugas memikirkan perkumpulan seperti apa yang kiranya dapat memberikan dukungan terhadap maksud tersebut tanpa merasa takut dalam perjuangannya, dan mereka diundang untuk hadir. Setelah seminggu pembentukannya komite tersebut diberi nama Kongres Perempuan Indonesia I.

Susunan panitia atau pengurus Kongres Perempuan Indonesia I, sebagai berikut.

1. Ketua : Ny. R.A. Soekonto (Wanita Oetomo)
2. Wakil Ketua : Nn. St. Moendjiah (Aisyiyah)
3. Penulis I : Nn. St. Soekaptinah (Ny. Sunaryo Mangunpuspito) dari Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling
4. Penulis II : Nn. Soenarjati (Ny. Sukemi) dari Puteri Indonesia
5. Bendahara I : Ny. Hardjodiningrat (Wanita Katholik)

---

<sup>83</sup>G.A. Ohorella, dkk, *op. cit.*, hal. 20.

6. Bendahara II : Nn. R.A. Soejatien (Ny. Kartowijono) dari Puteri Indonesia
7. Anggota : Nyi. Hadjar Dewantara (Wanita Taman Siswa)
8. Anggota : Ny. Drijowongso (Wanita PSII)
9. Anggota : Ny. Muridan Noto (Wanita PSII)
10. Anggota : Ny. Umi Salamah (Wanita PSII)
11. Anggota : Ny. Djohanah (Aisyiyah)
12. Anggota : Nn. Bardiah Murjati (Jong Java Dames Afdeeling)
13. Anggota : Nn. Hajinah (Ny. Mawardi) dari Aisyiyah
14. Anggota : Nn. Ismudijati (Ny. A. Saleh) dari Wanita Oetomo
15. Anggota : Ny. R.A. Mursandi (Wanita Katolik)

Dengan susunan panitia kongres yang telah terbentuk dalam waktu yang tergolong sangat singkat Kongres Perempuan Indonesia I berhasil dilaksanakan. Hal ini menunjukkan semangat yang megebu-gebu sehingga dengan segera kongres harus dilaksanakan. Panitia kongres mengekspresikan keinginannya dalam kongres dengan cara yang bermacam-macam. Ada yang berpidato, namun ada juga yang mengarang lagu yang akan dinyanyikan pada saat kongres.<sup>84</sup>

#### **D. Pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I**

##### **a. Waktu dan tempat pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I**

Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan di Yogyakarta pada sebuah pendopo milik seorang bangsawan bernama R. T. Joyodipoero. Beliau adalah

---

<sup>84</sup> Sukaptinah yang merupakan salah satu panitia Kongres Perempuan Indonesia I mengarang lagu Kinanti Sekar Gending Srikastawa yang dinyanyikan pada saat kongres.

salah seorang pegawai Sultan dan juga dikenal sebagai pendukung kesenian Jawa. Pendopo rumahnya sangat besar dan memiliki fungsi ganda, yakni digunakan sebagai tempat pertunjukan seni dan juga sebagai tempat untuk pertemuan partai-partai politik.<sup>85</sup> Pada masa itu penyelenggaraan pertemuan harus di ruangan tertutup kecuali telah mendapat izin dari pemerintah kolonial.

Pendopo milik R. T. Joyodipoero tersebut digunakan selama 4 hari berturut-turut sebagai tempat pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I. Kongres diadakan mulai dari tanggal 22 sampai pada tanggal 25 Desember 1928. Sebagai penanda dimulainya acara maka pada malam minggu tanggal 22 Desember 1928, diadakan resepsi untuk 1000 orang yang terdiri dari perwakilan organisasi perempuan dan organisasi nasional yang diwakili oleh kaum laki-laki.<sup>86</sup> Kongres pada hari pertama diadakan mulai dari pukul 19.00 sampai dengan pukul.24.00 WIB. Kedatangan para tamu dan peserta diiringi oleh gamelan. R.A. Soekonto sebagai ketua mengucapkan salam dan berterima kasih kepada R. T. Joyodipoero atas kesediannya meminjamkan pendopo rumahnya sebagai tempat pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I, Lalu menceritakan sejarah berdirinya kongres. Pada pukul. 21.00-23.00 para utusan perkumpulan perempuan diwajibkan untuk menguraikan asas perkumpulan masing-masing.

Keesokan harinya, pada tanggal 23 Desember 1928, acara dimulai pada pukul 08.30 sampai pukul 24.00. agenda pada tanggal 23 Desember 1928 adalah persidangan umum dan persidangan tertutup. Mulai pukul 08.30

---

<sup>85</sup> Susan Blackburn, *op. cit.*, hal. xxxi.

<sup>86</sup> Dari jumlah peserta yang cukup besar menandakan bahwa Kongres Perempuan Indonesia I mendapat simpati dari masyarakat.

sampai pukul 12.00 diadakan persidangan umum. Acara diawali dengan panembroma oleh anak-anak dari Siswa Praja dan keterangan asas kongres oleh St. Soekaptinah sebagai perwakilan dari panitia Kongres Perempuan Indonesia I. Kemudian acara dilanjutkan dengan pidato oleh beberapa perwakilan dari perkumpulan perempuan yang hadir dalam kongres.<sup>87</sup> Pada pukul 20.00 sampai 24.00 diadakan persidangan tertutup.

Pada hari senin tanggal 24 Desember 1928 acara dimulai pada pukul 08.30 sampai pukul 24.00. Persidangan umum diadakan pada pukul 08.30 sampai pukul 12.00 kemudian dilanjutkan dengan persidangan tertutup mulai pukul 20.00 sampai pukul 24.00. Tanggal 25 Desember 1928 merupakan hari terakhir pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I. Seperti pada hari-hari sebelumnya kongres diadakan pada pukul 08.30 sampai pukul 12.00 dengan agenda persidangan umum. Pada tanggal 25 Desember 1928 ini pula dihasilkan keputusan-keputusan Kongres.

b. Masalah yang dibahas dalam Kongres Perempuan Indonesia I

Kongres Perempuan Indonesia I, walaupun para perintisnya ada yang merupakan bagian dari Pergerakan Nasional,<sup>88</sup> namun masih mengungkap masalah-masalah yang bersifat Sosial budaya dan juga pendidikan bagi kaum perempuan. Masalah-masalah yang dibahas dalam Kongres Perempuan Indonesia I, yaitu:

---

<sup>87</sup> Perwakilan organisasi perempuan yang mendapat kesempatan pertama untuk berpidato adalah Siti Mundjiah, Nyi Hadjar Dewantara, Mugarumah dan perwakilan dari Putri Budi Sejati Surabaya.

<sup>88</sup> Ada beberapa organisasi wanita yang merupakan organisasi nasional maupun bagian dari organisasi pergerakan nasional, yaitu Puteri Indonesia, Jong Java bagian perempuan, Jong Islamieten Bond, dan Natdatoel Fataat.

### 1. Kedudukan wanita dalam hukum perkawinan (Islam)

Dalam hukum perkawinan Islam perempuan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Poligami dan perceraian sepihak dari suami menjadi masalah yang mengganggu para istri pada masa itu. Walaupun hukum Islam memperbolehkan para suami memiliki istri lebih dari satu namun banyak kaum perempuan tidak dapat menerima hal itu. Masalah pengajuan talak juga menjadi perhatian dalam Kongres Perempuan Indonesia I. Perempuan pada saat itu masih banyak yang belum mengetahui mengenai pengajuan talak dalam hukum Islam. Mereka mengira hanya para suami yang bisa mengajukan talak padahal sebenarnya Istri juga boleh mengajukan talak.<sup>89</sup>

### 2. Perlindungan wanita dan anak-anak dalam perkawinan

Perlindungan pada perempuan dan anak-anak dalam perkawinan masih sangat kurang pada saat itu. Perdagangan perempuan dan anak pada masa itu sedang marak. Masalah ini mengundang perhatian panitia Kongres Perempuan Indonesia I. Kongres Perempuan Indonesia I berusaha mencari solusi atas masalah ini.

### 3. Mencegah perkawinan anak-anak

Perkawinan anak-anak menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dalam Kongres perempuan Indonesia I. Perkawinan anak-anak pada masa itu banyak dialami oleh anak-anak perempuan. Sekitar umur 12 tahun mereka dipingit sampai orang tuanya menemukan calon suami yang dianggap cocok

---

<sup>89</sup> Dalam masalah pengajuan talak terdapat perdebatan yang cukup sengit antara organisasi Aisyiyah dan organisasi perempuan lainnya. Dari pihak Aisyiyah menyetujui talak yang dijatuhkan oleh laki-laki sebab perceraian akan sering terjadi apabila perempuan dapat menjatuhkan talak. Sedangkan perwakilan dari organisasi lainnya berpendapat bahwa perempuan juga boleh mengajukan talak.

bagi anaknya. Masalah ini mengundang kekhawatiran tersendiri bagi panitia kongres sebab perkawinan anak-anak dapat mengganggu perkembangan psikologis anak.

4. Pendidikan bagi anak-anak Indonesia, terutama bagi anak-anak gadis yang tidak mampu membayar biaya sekolah akan didirikan yayasan seri derma.<sup>90</sup>

Budaya dan hukum yang ada pada masa itu mengakibatkan tidak adanya pemerataan dalam pendidikan. Hanya anak-anak dari kalangan bangsawan yang dapat mengenyam pendidikan. Walaupun begitu tetap terdapat perbedaan antara anak perempuan dan laki-laki. Anak perempuan tidak mendapat kesempatan yang luas untuk mengenyam pendidikan. Anak-anak dari kalangan rakyat jelata hanya bisa meratapi nasib dan menunggu keadilan. Kongres Perempuan Indonesia I berusaha untuk membahas masalah ini dan mencari solusinya.

Apabila dicermati dengan teliti pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I (1928) mengarah pada keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Cara dan isi pidato beberapa peserta kongres mencerminkan keinginan perempuan Indonesia untuk terlibat dalam dunia politik. Keterlibatan yang dimaksud pada saat itu misalnya keikutsertaan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan. Dialog dalam Kongres Perempuan Indonesia I (1928) dilakukan dengan mediasi pidato. Setelah mengalami proses transformasi, gerakan perempuan Indonesia telah memiliki kemajuan, yakni dengan mulai

---

<sup>90</sup> Kongres Wanita Indonesia, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1978, hal. 30.

munculnya kesadaran politik. Kongres Perempuan Indonesia I (1928) menyiratkan bahwa persamaan derajat akan dicapai dalam susunan masyarakat yang tidak terjah. Kongres ini juga menandai sejumlah pergeseran penting dalam cara-cara kaum perempuan Indonesia dalam merumuskan *interest gender*.<sup>91</sup>

Kesepakatan untuk membahas masalah sosial dalam Kongres Perempuan Indonesia I merupakan cara untuk menghindari kecurigaan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu yang semakin agresif melarang adanya aktivitas politik di kalangan bumi putera. Meskipun begitu pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I yang berjalan selama lima hari sejak tanggal 22-25 Desember 1928 memberikan pesan politik kepada kaum perempuan Indonesia sebagai jalan untuk menembus dinding pemisah antara laki-laki dan perempuan yang merupakan produk ciptaan masyarakat Indonesia.

Pembahasan dan pengutaraan pendapat terhadap masalah-masalah tersebut dilakukan dengan berpidato. Pidato-pidato yang dikemukakan dalam kongres, yakni:

- 1) Makalah “Derajat Perempuan”, oleh Ny. Siti Mundjiah dari Aisyiyah.

Dalam pidatonya Siti Mundjiah mengatakan bahwa ia sangat bersyukur dan gembira atas dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia I. Dengan demikian perempuan Indonesia telah sadar dan bangkit dari tidurnya yang

---

<sup>91</sup> Hikmah Diniah, *op. cit.*, hal. 7.

nyenyak.<sup>92</sup> Sudah waktunya kaum perempuan Indonesia mulai maju selangkah demi selangkah. Apabila tidak bangkit saat itu juga maka perempuan Indonesia akan ketinggalan dan tidak akan mencapai kemajuan. Dengan kongres itu kenalannya juga bertambah. Siti Mundjiah juga mengatakan bahwa Aisyiyah sudah lama sekali mengimpikan pertemuan seperti kongres pada saat itu untuk merundingkan masalah yang menjadi keperluan bersama.

Dalam Kongres Perempuan Indonesia I, Siti Mundjiah juga menyarankan kepada peserta yang hadir bahwa mereka hendaknya berusaha untuk tidak memilih-milih ilmu pengetahuan, banyak tauladan dan lebar pandangannya serta bersabar dan tidak jemu melakukan sesuatu dengan cerdik dan berhati-hati.<sup>93</sup> Karena berasal dari Organisasi Islam Aisyiyah, Siti Mundjiah juga menyampaikan bahwa wanita muslim hendaknya berjilbab. Tersirat dari kalimat-kalimatnya, ia juga sangat tidak suka dengan perempuan yang telah maju namun melanggar kodratnya seperti berambut pendek, menggunakan pakaian seperti laki-laki sehingga tidak tampak lagi sifat-sifat keperempuanannya.

## 2) Makalah “Persatuan Manusia” oleh Siti Hajinah dari Aisyiyah

Dalam pidatonya ini, Siti Hajinah menyampaikan bahwa sangat menyenangkan apabila dapat berkeliling Indonesia dalam rangka perjuangan bersama-sama dengan para pejuang Indonesia lainnya. Menurutnya berkeliling Indonesia dapat menambah wawasannya. Ia menjadi mengenal tanah airnya yang tersebar di berbagai pulau. Di samping itu Siti Hajinah juga mengenal

---

<sup>92</sup> Susan Blackburn, *op. cit.*, hal. 38.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal. 40.

saudara-saudara setanah airnya. Beliau juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Kongres Perempuan Indonesia I, karena dapat membicarakan keperluan, kewajiban, dan kemajuan perempuan Indonesia serta menjalin kerjasama.<sup>94</sup>

3) Makalah “Keadaan Istri”, Nyi Hadjar Dewantara dari Taman Siswa.

Dalam kongres Perempuan Indonesia I, Nyi. Hadjar Dewantara mengatakan bahwa perempuan khususnya para istri selama ini hanya terkungkung di rumah saja untuk mengurus rumah tangga. Dengan diadakannya Kongres Perempuan Indonesia I maka perempuan harus mulai bangkit dan berubah untuk memperoleh kemajuan.

4) Makalah “Salah Satu Kewajiban Perempuan”, oleh S.Z. Goenawan

S. Z. Goenawan mengatakan bahwa menurut kodrat kaum perempuan tidak dapat dikatakan rendah derajatnya sebab ikut andil dalam sejarah dunia dan kemanusiaan. Bersama laki-laki perempuan telah menciptakan sejarah dunia. Dalam kemanusiaan perempuan bernilai tinggi sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri dan sebagai teman.<sup>95</sup> Meskipun begitu dunia selalu menempatkan perempuan di belakang dan dipandang tidak penting. Sejarah hanya mencatat apa yang ada di depan mata. Sementara perempuan melakukan sesuatu yang berguna bagi banyak orang seringkali tidak tampak di depan mata. Ketika sudah menikah, dalam mengejar tujuan seorang suami akan membutuhkan banyak bantuan dari istrinya. S. Z. Goenawan memberikan contoh dengan menceritakan kehidupan seorang negarawan

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal.121.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 93.

Inggris yang termasyur dan menikah pada tahun 1839. Istrinya selalu berada disampingnya ketika ia sedang menjalankan pekerjaannya. Ketika berpidato dalam perlemen istrinya selalu mempersiapkan kelengkapan dalam berpidato. Ia juga terlibat dalam pergerakan kebangsaan.

5) Makalah “Kedudukan perempuan dalam kehidupan bersama” oleh Djojoadigoeno dari Wanita Utomo

Dalam pidatonya Djojoadigoeno mengatakan bahwa banyak perempuan mengeluh karena menganggap kedudukan mereka dengan laki-laki tidaklah sama. Perempuan Timur terlihat berbeda dengan laki-laki sebab adanya perbedaan pekerjaan. Pekerjaan berat dilakukan oleh laki-laki sedangkan pekerjaan ringan dikerjakan oleh perempuan. Namun hal itu tidak berhubungan dengan tinggi rendahnya kedudukan.<sup>96</sup> Mengurus rumah tangga menjadi pekerjaan perempuan meskipun pekerjaan ini sukar. Demikian juga laki-laki memiliki banyak kewajiban yang mulia dan sukar. Di pulau Jawa laki-laki memiliki kewajiban untuk mengurus pemerintahan. Namun di Bugis Makassar wanita juga boleh terlibat dalam kegiatan pemerintahan bahkan bisa menjadi raja. Di Eropa belum lama perempuan juga memiliki hak untuk menjadi wakil rakyat atau memilih wakil rakyat di parlemen. Yang menjadi keluhan perempuan timur adalah kehidupan perkawinan sebab laki-laki boleh beristri lebih dari satu dan juga tentang pemegang harta benda setelah menikah. Setelah menikah apa yang menjadi harta perempuan dianggap milik

---

<sup>96</sup> Banyak orang berpendapat bahwa perbedaan karakter (gender) yang mempengaruhi jenis pekerjaan antara laki-laki dan perempuan berbeda dapat dianggap sebagai perbedaan kedudukan. Pekerjaan laki-laki dianggap lebih berat daripada pekerjaan perempuan sehingga kedudukan laki-laki lebih tinggi. Sebenarnya antara kedudukan dan gender merupakan dua hal yang berbeda.

suaminya juga. Namun laki-laki memiliki kekuasaan lebih terhadap harta benda dalam rumah tangga.

6) Makalah “Keadaan Perempuan di Eropa”, oleh Ny. Sastroamidjojo

Ny. Sastroamidjojo menceritakan tentang pengalamannya dalam melihat keadaan perempuan Eropa. Banyak perempuan Timur menganggap bahwa kedudukan perempuan Eropa lebih tinggi daripada perempuan Timur. Namun hal ini salah sebab laki-laki Eropa menganggap kedudukan perempuan jauh lebih rendah daripada mereka. Namun demikian kemajuan dan kebebasan kaum perempuan Eropa memang sudah besar. Kemajuan inilah yang patut dicontoh oleh perempuan Timur.<sup>97</sup> Perempuan Eropa banyak yang telah melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh laki-laki. Perempuan yang menjadi sopir taksi atau konduktur trem itu sudah tidak mengherankan lagi.<sup>98</sup> Bahkan di Perancis sempat diberlakukan peraturan wajib militer untuk kaum perempuan. Ny. Ali Sastroamidjojo menganggap ini kemajuan yang terlampaui besar. Beliau juga mengatakan bahwa yang patut ditiru dari perempuan Eropa adalah kemajuan dan kebebasannya namun harus disesuaikan dengan adat ketimuran. Perempuan Timur bisa mendapatkan kemajuan dan kebebasan itu asalkan mau bekerja keras dengan penuh keyakinan.

7) Makalah “Kewajiban dan cita-cita kaum perempuan”, oleh Siti Soendari  
dari Poetri Indonesia

---

<sup>97</sup> Kemajuan yang dimaksud oleh Ny. Sastroamidjojo dan oleh sebagian besar peserta kongres adalah kemajuan dalam memperoleh pendidikan, bukan kemajuan yang ekstrem seperti yang terjadi pada feminis radikal di Eropa.

<sup>98</sup> Susan Blackburn, *op. cit.*, hal. 102.

Pidato Siti Soendari kental sekali dengan nuansa nasionalisme. Pertama-tama ia menjelaskan mengapa tidak menggunakan bahasa Belanda atau bahasa Jawa. Siti Soendari mengingatkan kepada peserta kongres tentang Sumpah Pemuda yang diucapkan dalam Kongres Pemuda Indonesia ke-2 dua bulan sebelum Kongres Perempuan Indonesia Pertama dilaksanakan. Dalam kongres pemuda ke-2 itu diikrarkan bahwa mereka yang hadir hendak berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu yaitu bangsa, tanah air dan bahasa Indonesia.<sup>99</sup> Siti Soendari menegaskan bahwa untuk mencapai Indonesia Raya tentu saja ketika Indonesia telah menjadi bangsa yang besar dan mulia. Hal itu dapat dicapai apabila putra dan putri Indonesia mampu membangun perasaan besar dan mulia dalam hati mereka masing-masing. Dalam berumah tangga ia mengatakan bahwa saling menghargai itu penting. Dalam kehidupan bermasyarakat perempuan juga memiliki kewajiban seperti ikut terlibat dalam gerakan kebangsaan.

8) Makalah “Pergerakan Kaum Istri, Perkawinan dan perceraian” oleh R.A. Soedirman dari organisasi Putri Budi Sejati.

Dalam makalahnya ini R.A. Soedirman menegaskan bahwa perempuan Indonesia harus merebut hak-hak mereka sehingga dapat menjunjung derajat kaum perempuan itu sendiri, derajat bangsa dan derajat tanah air Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu maka seorang istri harus mengetahui apa kewajibannya serta bisa melakukannya dan mempertanggungjawabkan kewajiban itu selaras dengan zaman. Agar bisa menjalankan kewajiban istri

---

<sup>99</sup> Ikrar ini dikenal dengan sebutan “Sumpah Pemuda”.

dengan baik maka perempuan harus mengubah sendiri kebiasaan dan adat-istiadat sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>100</sup> Apabila hal itu tidak dilakukan maka kaum perempuan akan semakin tertinggal dan semakin tidak ada harganya. Oleh karena itu kaum perempuan harus berusaha dengan kemampuannya sendiri dan terlebih dahulu mampu menghargai diri sendiri sehingga kaum pria dapat menghargai kaum perempuan.

9) Makalah “ Perkawinan Anak-Anak” oleh Siti Mugarumah, dari organisasi Putri Indonesia.

Dalam makalahnya ini Siti Mugarumah memandang bahwa masalah perkawinan anak-anak merupakan masalah yang terpenting bagi bangsa Indonesia mengingat tingginya angka perkawinan anak. Tulisannya ini terinspirasi oleh tulisan Dr. Sutomo<sup>101</sup> tentang perkawinan anak-anak yang juga sering dibahas dalam organisasi Muhammadiyah dan Juga Sarekat Islam. Seringkali murid-murid perempuan yang baru berumur 11 atau 12 tahun harus dikeluarkan dari sekolahnya sebab akan dinikahkan.<sup>102</sup> Hal ini merupakan tindakan yang mematahkan semangat dan keselamatan anak perempuan yang masih ingin bersekolah dan mencapai cita-citanya.

Dalam kasus ini anak perempuan dinikahkan dengan orang yang tidak dikenalnya. Laki-laki yang akan dinikahkan itu bisa lebih muda usianya dan juga bisa lebih tua dari anak perempuan yang akan dinikahkan. Hal ini sama-sama menimbulkan kekhawatiran. Pertama, jika anak perempuan menikah

---

<sup>100</sup> Susan Blackburn, *op. cit.*, hal. 158.

<sup>101</sup> Dr. Sutomo adalah pendiri Organisasi Budi Utomo. Ide untuk mendirikan organisasi Budi Utomo berasal dari Dr. Wahidin Sudirohusodo.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal. 174.

dengan yang lebih tua maka anak perempuan itu tidak dapat mengerti dan memahami suaminya. Kedua, jika anak perempuan dinikahkan dengan yang sama-sama masih sangat muda mereka tidak mengerti bagaimana layaknya mengurus rumah tangga. Ketika seorang perempuan yang juga masih anak-anak melahirkan anak maka ia harus memeliharanya. Namun hal ini akan menimbulkan masalah baru sebab ibunya juga masih memiliki pikiran untuk bermain seperti anaknya. Hal ini dapat menghasilkan generasi yang tidak berbeda dari generasi sebelumnya sebab dididik oleh didikan yang tidak sempurna dan tetap akan melestarikan masa kecil yang tidak bahagia.

10) Makalah “ Bagaimanakah Jalan Kaum Perempuan Saat ini dan Bagaimanakah Kelak?” oleh Tien Sastrowiryo.

Tien Sastrowiryo mengemukakan pandangannya tentang perempuan Indonesia yang masih terbelakang dibandingkan dengan perempuan Eropa, bahkan sesama benua Asia. Perempuan Indonesia saat itu masih belum memiliki kesempatan yang luas dalam mengenyam pendidikan dan ruang lingkup pekerjaannya masih dalam ruang lingkup pekerjaan rumah tangga. Ilmu yang diperoleh melalui pendidikan dapat membuahkan hasil yang memuaskan. Ada beberapa kelebihan yang dikemukakan oleh Tien Sastrowiryo terkait dengan pendidikan perempuan.

1. Dengan ilmu, maka rumah tangga akan menjadi nyaman dan memiliki tabungan. Dengan begitu maka bangsa Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang miskin.

2. Jika mengurus anak-anak dengan ilmu maka anak-anak akan terhindar dari penyakit dan kelak akan menjadi bangsa yang besar dan teguh.
3. Memelihara, dan mendidik anak dengan pengetahuan maka anak menjadi pandai, berani, berbudi tinggi, dan juga cinta akan bangsanya.
4. Dengan mengajarkan anak paham kebangsaan maka anak akan tahu akan keadaan bangsanya dan mampu membandingkannya dengan bangsa lain.
5. Mengajari anak adat istiadat yang masih relevan sehingga dapat memulyakan bangsanya serta meninggalkan kebiasaan yang buruk sehingga bangsa Indonesia tidak mengalami kemunduran.
6. Mengajarkan anak tentang pengetahuan umum supaya mengerti perkembangan zaman.
7. Memperhatikan keperluan seperti pendidikan kaum perempuan agar bangsa Indonesia dapat mengatur ekonominya.<sup>103</sup>

Selain pidato-pidato di atas, R.A. Sukonto selaku ketua kongres menyampaikan pidato pada pembukaan kongres. Dalam pidato itu R.A. Sukonto menyampaikan bahwa perkumpulan Wanita Utama sudah sejak lama menginginkan untuk mengajak kaum perempuan Indonesia untuk bekerjasama. Ketika bertemu dengan Nyi. Hadjar Dewantara, dan R.A. Suyatin, mereka berinisiatif untuk mengadakan kongres. Dalam pertemuan itu mereka menilai bahwa kaum perempuan Indonesia masih kurang cerdas dan tidak ada kemajuan apa-apa. Dalam pidato tersebut, R.A. Sukonto mengatakan bahwa kaum perempuan Indonesia masih sangat jauh tertinggal

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal. 197.

dari perempuan di negeri lain. Walaupun sudah banyak organisasi perempuan, namun bagaimana dapat maju apabila tidak ada kerjasama satu sama lain. Kaum perempuan sudah waktunya berusaha untuk mengangkat derajatnya supaya tidak duduk di dapur saja.

Pidato yang disampaikan oleh R.A. Soekonto memiliki gaya tersendiri walaupun ucapan selamat datangnya kepada peserta kongres tidak memuat hal yang luar biasa namun substansi pokok pidatonya seolah dipersiapkan untuk sebuah pertemuan Dharma Wanita di masa Orde Baru. Pidato R.A. Soekonto berisi sejumlah perintah kepada kaum perempuan yang diucapkan dalam perintah singkat seperti, “Perempuan harus rajin, perempuan harus bersih, perempuan harus hemat” dan lain sebagainya.

Selain beberapa pidato yang dikemukakan dalam Kongres Perempuan Indonesia I, terdapat juga anggota kongres yang memberi sumbangan berbeda, seperti halnya Siti Soekaptinah yang mengarang Panembra” Kinanti Sekar Gending Srikastawa: Ladrang Pelog Barang”. Lagu karangannya itu dinyanyikan pada malam pembukaan kongres.

Masalah-masalah yang dibahas dalam Kongres Perempuan Indonesia I masih tetap menjadi perhatian kongres PPII (Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia) sebanyak 4 kali. Kongres ini dilakukan pada jeda antara Kongres Perempuan Indonesia I dan Kongres Perempuan Indonesia II. Masalah di atas menjadi perhatian utama karena sejalan dengan perjuangan wanita dalam rangka peningkatan harkat wanita sehingga dapat menjadi mitra kaum pria dalam perjuangan bangsa. Hal yang terpenting dalam

perkembangan PPPI/PPII adalah keputusan bahwa kesatuan pergerakan wanita Indonesia berasaskan kebangsaan dan menyatakan diri sebagai bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia.<sup>104</sup>

Kongres Perempuan Indonesia I yang berjalan selama empat hari diwarnai dengan adanya perbedaan pendapat mengenai poligami antara perwakilan dari organisasi Aisyiyah dengan organisasi agamis lainnya (wanita katolik, Natdatul Fataat, dll) dan organisasi perempuan yang berafiliasi pada organisasi nasional (Puteri Indonesia, Wanita Utama, Wanita Taman Siswa, dll). Berbeda dengan perwakilan dari Aisyiyah, yang mendukung poligami dan hukum *fiqh* yang dijalankan pada saat itu, perwakilan dari Natdatul Fataat memberi usulan untuk mengamandemen undang-undang perkawinan Islam agar dapat memperbaiki hak-hak perempuan dalam perkawinan, memberi kesempatan bagi perempuan untuk lebih mudah memperoleh perceraian, memberi perlindungan kepada perempuan atas perceraian yang sewenang-wenang dari suami serta kewajiban suami untuk mendukung biaya anak setelah perceraian.<sup>105</sup> Perwakilan dari JIBDA (Jong Islamieten Bond Dames Affdeeling) juga tidak kalah radikal jika dibandingkan dengan perwakilan dari Natdatul Fataat. Mereka memasukkan mosi kepada dewan-dewan keagamaan mengenai bagaimana memajukan hak-hak perempuan sebagaimana sebenarnya telah disebutkan dalam agama Islam. Masalah tentang poligami menyebabkan timbulnya persengketaan besar dan mengakibatkan pecahnya

---

<sup>104</sup> KOWANI, *op. cit.*, hal. 31.

<sup>105</sup> Susan Blackburn, *op. cit.*, hal. xix

federasi di pertengahan tahun 1930-an. Oleh sebab itu maka pada kongres-kongres selanjutnya selalu meminimalkan topik mengenai poligami.

Hal ini mungkin menjadi suatu alasan mengapa gerakan perempuan Indonesia tidak terlalu menghargai laporan Kongres Perempuan Indonesia I (1928).<sup>106</sup> Meskipun Kongres Perempuan Indonesia I (1928) memperlihatkan maraknya perbedaan pendapat namun Kongres mampu memberikan toleransi demi persatuan antara perkumpulan-perkumpulan perempuan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya beberapa keputusan kongres. Jika dibandingkan dengan kongres-kongres di kemudian hari, Kongres Perempuan Indonesia I (1928) patut dijadikan contoh sebagai kongres yang bijak dalam mengatasi perbedaan pendapat. Kongres-kongres perempuan yang dilaksanakan setelah tahun 1928 mengalami kesulitan dalam mengatasi perbedaan pendapat sehingga mengarah pada perpecahan dalam perkumpulan-perkumpulan perempuan Indonesia.

Terdapat wakil-wakil dari 30 organisasi wanita yang hadir dalam Kongres Perempuan Indonesia I.<sup>107</sup> Selain itu terdapat juga perwakilan dari organisasi lain yang anggotanya laki-laki. Organisasi tersebut antara lain Budi Utomo, PNI, PSI, dan Muhammadiyah. Soekarno sebagai seorang nasionalis yang terkenal pada masa itu mewakili PNI Untuk hadir dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama dan menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kongres. Dukungannya itu terlihat dalam cuplikan pidatonya berikut ini.

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hal. xxxvii

<sup>107</sup> Lihat lampiran no. 2, hal. 99.

*Berbahagialah kongres para kaum iboe, diadakan pada suatu waktu dimana masih sahaja kaum bapak jang mengira bahwa perdjoangan mendedjar keselamatan nasional bisa djuga lekas berhasil zonder sokongannja kaum iboe. Oleh karena dari pada kaum bapak masih banjak jang kurang pengetahuannja akan harganja sokongan kaum iboe itoe. Kita tidak hanja gembira hati akan kongres itu oleh karena kaum bapak belum insjaf akan keharusan kenaikan deradjat kaun iboe. Kita gembira ialah karena teristimewa djuga di kalangan kaum iboe belum banjak yang mengetahui atau mendjadikan kewadjibannya untuk mentjeburkan dalam perdjoangan bangsa dan belum banjak yang berkehendak akan kenaikan deradjad itoe.<sup>108</sup>*

Dukungan Soekarno itu tentu saja ada kaitannya dengan kenyataan dikemudian hari gerakan perempuan yang berembrio pada Kongres Perempuan Indonesia Pertama mulai merambah kegiatan politik bahkan ikut serta dalam perang kemerdekaan. Orang yang banyak sekali memberi dukungan moral dalam mewujudkan Kongres Perempuan Indonesia I adalah Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar menyebut peristiwa ini sebagai Tonggak Sejarah Pergerakan Wanita Indonesia. Dalam kongres Ki Hadjar Dewantara juga memberi kata sambutan. Kata sambutannya itu diakhiri dengan sebuah tembang Jawa bernama *Witing Kelopo* yang melambangkan perempuan sebagai makhluk yang mampu mengatur masyarakat.<sup>109</sup>

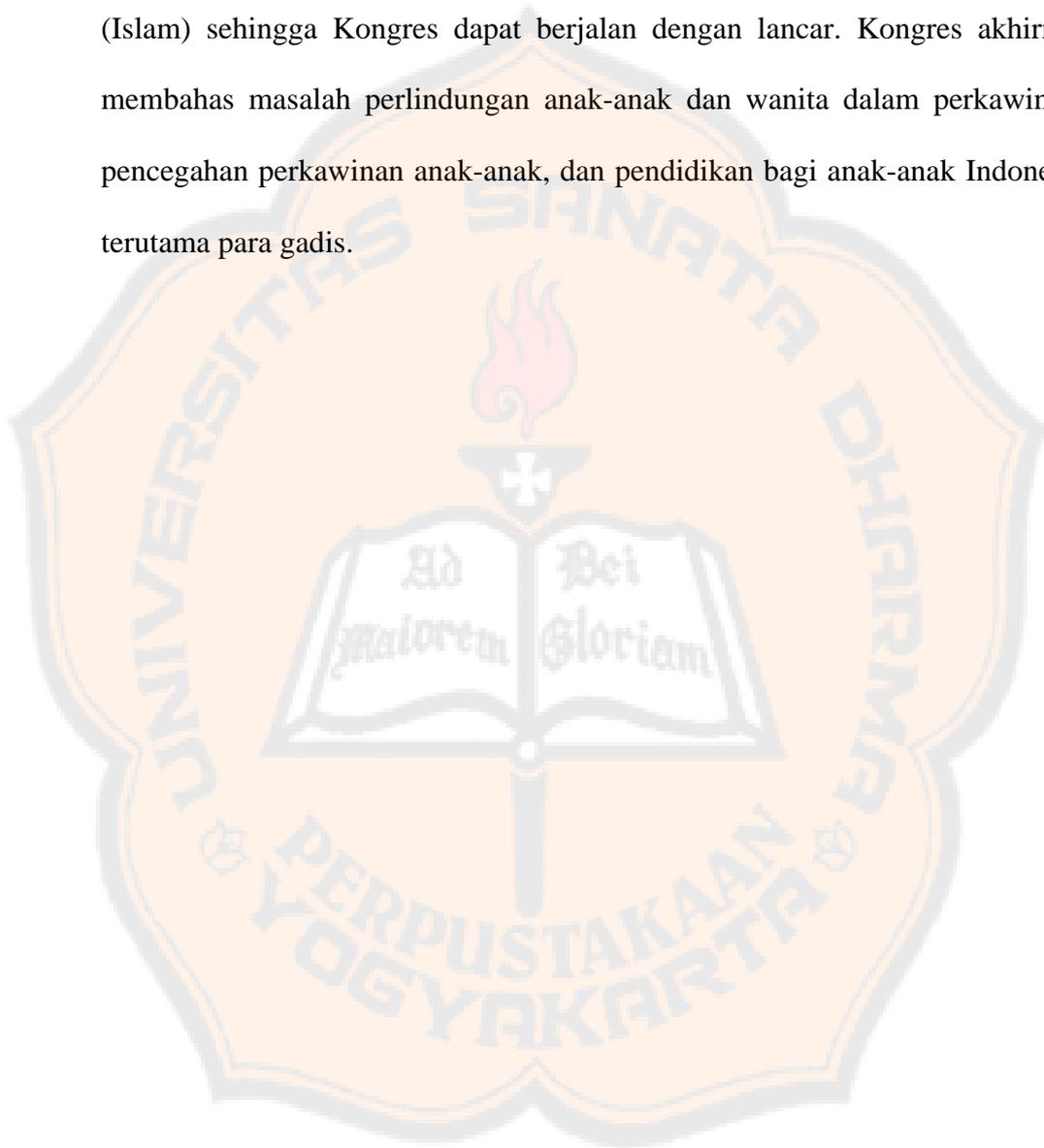
Kehadiran beberapa organisasi yang beranggotakan laki-laki tersebut menunjukkan dukungan mereka terhadap perempuan yang ingin memperjuangkan hak-hak mereka dan kelak akan dapat lebih berpartisipasi dalam pergerakan kebangsaan menuju Indonesia merdeka seperti yang dicita-citakan oleh Soekarno seorang nasionalis yang sangat diteladani pada saat itu.

---

<sup>108</sup> [http://geocities.com/lembaga\\_sastrapembebasan/](http://geocities.com/lembaga_sastrapembebasan/)

<sup>109</sup> Suyatin Kartowijono, *Mencari Makna Hidupku*, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1983, hal. 41.

Dari pembahasan di atas maka hipotesis terbukti sebab perbedaan pendapat peserta Kongres Perempuan Indonesia I mengenai poligami dapat diatasi dengan menitikberatkan pada pembahasan aspek hukum perkawinan (Islam) sehingga Kongres dapat berjalan dengan lancar. Kongres akhirnya membahas masalah perlindungan anak-anak dan wanita dalam perkawinan, pencegahan perkawinan anak-anak, dan pendidikan bagi anak-anak Indonesia terutama para gadis.



## BAB IV

### HASIL KONGRES PEREMPUAN INDONESIA I

Kongres Perempuan Indonesia Pertama terasa “hidup” dengan bermunculannya berbagai pendapat di antara perkumpulan-perkumpulan Perempuan yang hadir dalam kongres itu. Walaupun perbedaan pendapat itu menimbulkan debat yang cukup panjang dan sangat menarik namun kongres dapat menghasilkan berbagai kesatuan ide. Pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I juga memberi pengaruh positif bagi perkembangan gerakan perempuan di kemudian hari.

#### A. Keputusan Kongres Perempuan Indonesia I

Berdasarkan kongres yang telah berjalan selama 4 hari mulai dari tanggal 22 sampai 25 Desember 1928, maka dihasilkan beberapa keputusan yaitu:

1. Mendirikan badan federasi bersama “Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia” (PPPI).<sup>110</sup>

Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia merupakan organisasi seperti perkumpulan biasa, yang dipimpin oleh pengurus harian dan setidaknya memiliki ketua, sekretaris, bendahara dan dua orang komisaris. Dalam organisasi minimal dibutuhkan dana sebesar 1 gulden. PPPI Juga diminta untuk mendirikan surat kabar yang redaksinya akan dipilih oleh

---

<sup>110</sup> Di kemudian hari federasi PPPI berubah nama menjadi PPII( Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia) dan pada bulan September 1935 organisasi ini dibubarkan.

pengurus PPPI. Tempat kedudukan pengurus dipilih berdasarkan banyaknya jumlah anggota, artinya perkumpulan yang sudah masuk dalam keanggotaan mempunyai hak pendirian PPPI.<sup>111</sup> Namun untuk sementara PPPI Berada di Yogyakarta yang menjadi tempat kediaman pengurus. Pengurus untuk sementara waktu yaitu sebagai berikut.

- a) R.A. Soekonto (ketua)
- b) Siti Mugarumah
- c) Nyi Hadjar Dewantara
- d) Siti Munjiah
- e) Siti Sukaptinah
- f) Suyatin

Anggota pengurus lainnya akan dipilih oleh ketua PPPI yaitu R. A. Sukonto. Perkumpulan-perkumpulan yang sudah menjadi anggota PPPI yaitu:

- a) Wanita Utama, Yogyakarta
- b) Wanita Katolik, Yogyakarta
- c) Taman Siswa, Yogyakarta
- d) Aisyiyah, Yogyakarta
- e) Jong Islamieten Bond cabang Yogyakarta
- f) Pemuda Indonesia bagian perempuan cabang, Yogyakarta
- g) Jong Islamieten Bond cabang Batavia
- h) Jong Islamieten Bond cabang Tegal
- i) Wanita Katolik, Solo

---

<sup>111</sup> Lihat lampiran no.3, hal. 101.

- j) Karti Woro, Solo
  - k) Aisyiyah, Solo
  - l) Panti Krida Wanita, Pekalongan
  - m) Budi Wanita, Solo
  - n) Kesuma Rini, Kudus
  - o) Darma Laksmi, Salatiga
  - p) Putri Indonesia Surabaya
  - q) Wanita Sejati, Bandung
  - r) Margining Kautaman, Kemayoran
  - s) Rukun Wanodiyo, Batavia
  - t) Putri Budi Sejati, Surabaya
2. Menerbitkan surat kabar yang redaksinya dipercayakan pada pengurus PPPI. Anggota-anggota redaksi terdiri dari Nyi. Hadjar Dewantara, Nn. Hajinah, Ny. Ali Sastroamidjojo, Nn. Ismudijati, Nn. Badiyah, dan Nn. Sunaryati.
  3. Mendirikan *Studiefonds* yang akan menolong gadis-gadis yang tidak mampu.

PPPI mendirikan badan ini untuk menolong anak-anak perempuan yang tidak mampu membiayai sekolahnya. Meskipun badan ini dibentik oleh PPPI namun *Studiefonds* ini dipisahkan dari PPPI.
  4. Memperkuat pendidikan kepanduan putri<sup>112</sup>
  5. Mencegah perkawinan anak-anak

---

<sup>112</sup> Pendidikan Kepanduan Putri merupakan sebutan lain untuk kegiatan Pramuka bagi kaum putri

Sebagai upaya untuk mencegah perkawinan anak maka setiap anggota harus melakukan propaganda tentang keburukan perkawinan anak di bawah umur. Agar upaya tersebut bisa berjalan lancar maka pengurus harus meminta tolong kepada pejabat pemerintah untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada rakyat.

6. Mengirimkan mosi kepada pemerintah agar:
  - a. Secepatnya diadakan *fonds* bagi janda dan anak-anak
  - b. Tunjangan bersifat pensiun (*Onderstand*) jangan dicabut
  - c. Sekolah-sekolah putri diperbanyak
7. Mengirimkan mosi kepada Raad (Majelis) Agama agar tiap talak dikuatkan secara tertulis sesuai dengan peraturan agama.

Pada hari terakhir kongres itu pula PPPI yang dinyatakan berdiri pada tanggal 25 Desember 1928 mempunyai usaha-usaha antara lain:

- 1) Mengadakan kongres setiap tahun untuk memperbincangkan kedudukan wanita Indonesia.
- 2) Menerbitkan surat kabar yang merupakan sarana untuk memperbincangkan masalah wanita.
- 3) Menjadi hakim pemisah untuk mendamaikan anggota-anggota yang berselisih
- 4) Tempat kedudukan pengurus PPPI ditetapkan menurut jumlah anggota dan untuk pertama kalinya Mataram Yogyakarta menjadi tempat kedudukan pengurus.

Susunan pengurus PPPI tahun 1928 sampai dengan kongres tahun 1929, adalah:

- Ketua : Ny. R. A. Sukonto
- Wakil ketua : Nn. R. A. Suyatin (Ny. Kartowijono)
- Penulis I : Nn. St. Sukaptinah (Ny. Mangunpuspito)
- Penulis II : Nn. Mugarunah
- Bendahara : Ny. R. A. Hardjodiningrat
- Komisaris : Nyi. Hadjar Dewantara dan Ny. Siti Mundjiah

f. Keanggotaan belum sepenuhnya diatur sehingga ada kemungkinan beberapa cabang dari satu organisasi menjadi anggota PPPI, antara lain:

- Wanita Utomo Mataram
- Wanita Katolik Mataram
- Taman Siswa Mataram
- Aisyiyah Mataram
- Jong Islamieten Bond bagian wanita, Mataram
- Putri Indonesia (pemuda Indonesia bagian wanita), Mataram
- Jong Islamieten Bond bagian wanita, Jakarta
- Jong Islamieten Bond bagian wanita, Tegal
- Wanita Katolik, Solo
- Karto Woro, Solo
- Aisyiyah, Solo
- Putri Krido Wanito, Pekalongan
- Budi Wanito Solo

- Kesumo Rini, Kudus
- Darmo Laksmi, Salatiga
- Putri Indonesia, Surabaya
- Wanita Sejati, Bandung
- Margining Kutaman, Kemayoran
- Putri Budi Sejati, Surabaya

Dengan demikian maka melalui keputusan pertama Kongres Perempuan Indonesia I untuk membentuk PPII maka secara berkelanjutan perempuan Indonesia terangkat martabatnya dan terpenuhi haknya serta dapat berjuang bersama kaum laki-laki dalam revolusi kemerdekaan dan dalam mengisi kemerdekaan sekarang ini.

#### **B. Dampak Kongres Perempuan Indonesia I bagi perkembangan gerakan perempuan di Indonesia.**

Kongres Perempuan Indonesia I memberi berbagai dampak positif bagi kemajuan perempuan yang terlihat dari berbagai gerakan perempuan pada tahun-tahun berikutnya. Masalah yang diperjuangkan perempuan di kemudian hari menjadi lebih bervariasi dan bentuk gerakannya juga beragam, mulai dari mendirikan sekolah dan menulis artikel yang juga telah dilakukan oleh beberapa perempuan sebelum pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I sampai pada keterlibatan dalam dunia politik dan perjuangan kemerdekaan. Dampak dari Kongres Perempuan Indonesia I bagi gerakan perempuan

Indonesia di kemudian hari hampir melingkupi berbagai aspek, yakni aspek sosial, politik, dan pertahanan keamanan.

a. Sosial

Pengaruh Kongres Perempuan Indonesia I bagi gerakan perempuan dalam bidang sosial terlihat dari permasalahan yang dibahas dalam Kongres selanjutnya dan hasil yang dicapai. Kongres Perempuan Indonesia merupakan rapat akbar bagi berbagai perkumpulan perempuan yang ada pada saat itu dan merupakan suatu gerakan untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang pada umumnya yang dihadapi oleh perempuan Indonesia pada saat itu. Masalah sosial masih mewarnai gerakan perempuan sampai pada Kongres Perempuan Indonesia II.

Jeda antara Kongres Perempuan Indonesia I (1928) dan Kongres Perempuan Indonesia II (1935), diisi dengan kegiatan PPPI (Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia) pada tahun 1929 dan PPII (Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia) pada tahun 1930 sampai Maret 1935. Sejak dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia I sampai pada Kongres Perempuan Indonesia II masalah-masalah sosial masih menjadi agenda Kongres dengan tujuan untuk mencari solusi atas masalah sosial yang belum teratasi dan meningkatkan hasil atas masalah yang telah teratasi.

Masalah yang dibahas sejak PPPI (1929) sampai pada Kongres Perempuan Indonesia IV masih hampir sama dengan masalah yang diperjuangkan dalam Kongres Perempuan Indonesia I. Masalah-masalah itu antara lain:

- 1) Dibuatnya UU yang melarang pergundikan
- 2) Meningkatkan kegiatan Seri Derma dalam menyokong pendidikan para gadis.
- 3) Membuka cabang bagi majalah *Isteri* dan memberi sokongan berupa uang atau mencarikan iklan atau langganan.
- 4) Mengirimkan delegasi ke All Asian Women Conference yang diadakan di Lahore pada bulan Januari 1931.
- 5) Membentuk Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan Indonesia (BPPPI) yang berkewajiban menyelidiki keadaan buruh wanita di seluruh Indonesia.
- 6) Menetapkan kewajiban utama bagi perempuan Indonesia untuk menumbuhkan generasi baru yang lebih sadar akan kebangsaannya
- 7) Pemberantasan buta huruf bagi perempuan Indonesia dan diharapkan mencapai target dalam membebaskan 5000 perempuan dewasa dari buta huruf pada tahun 1937.
- 8) Memperhatikan kesehatan perempuan Indonesia
- 9) Membuat rancangan UU Perkawinan
- 10) Pemberantasan pelacuran dan perdagangan perempuan juga anak-anak.
- 11) Menetapkan hari ibu

Beberapa masalah sosial yang tertera di atas menunjukkan adanya usaha gerakan perempuan untuk mempertahankan apa yang telah mereka capai dan meningkatkan perhatian pada masalah-masalah sosial dalam rangka memajukan perempuan dan bangsa.

b. Politik

Gerakan perempuan Indonesia mulai memberi perhatian pada masalah politik sejak Kongres Perempuan Indonesia III. Dalam keputusan Kongres Perempuan Indonesia III ditegaskan bahwa kongres menyarankan kepada anggota-anggotanya untuk meneruskan tugas dan penyelidikan tentang hak untuk memilih. Kongres Perempuan Indonesia IV di Semarang tahun 1941 memutuskan bahwa kongres setuju akan adanya aksi GAPI “Indonesia Berparlemen” dan akan membantu aksi GAPI “Indonesia Berparlemen yang akan dijalankan oleh anggota-anggota Kongres. Dalam Kongres Perempuan Indonesia IV itu juga telah diputuskan untuk mengirim mosi kepada pemerintah dalam rangka menuntut agar perempuan dilibatkan dalam memilih anggota Dewan Kota untuk golongan Indonesia.

Pada masa perang kemerdekaan (1945-1949), keterlibatan gerakan perempuan Indonesia dalam bidang politik terlihat dari dibentuknya PERWANI (Persatuan Wanita Indonesia) sebagai pengganti dari organisasi Fujinkai. PERWANI bertugas untuk membantu Komite nasional di daerah dalam mengobarkan semangat kemerdekaan. Menjelang Kongres Wanita Indonesia ke-V, PERWANI mengadakan kongres yang merupakan kongres pertama setelah proklamasi kemerdekaan RI. Dalam kongres itu diputuskan untuk melebur PERWANI (Persatuan Wanita Indonesia) dan WANI (Wanita Indonesia) menjadi satu dengan nama PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia). Anggota-anggota PERWARI akan diberikan pendidikan politik

umum agar mereka sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan sebagai “ibu” bangsa.

Dalam masa demokrasi liberal (1950-1959) gerakan perempuan Indonesia semakin gencar dalam merambah dunia politik. Hal ini terlihat dalam masalah yang dibahas dalam kongres dan keputusan yang dihasilkan. Dalam Kongres Wanita Indonesia ke-X Yang diadakan di Palembang pada tahun 1955, kongres mengirimkan pernyataan kepada Menteri Luar Negeri bahwa kongres mendukung sepenuhnya usaha pemerintah untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Perkembangan gerakan perempuan tidak hanya di dalam KOWANI namun juga di luar KOWANI. Atas prakarsa dari wakil-wakil organisasi karyawan dari 7 Departemen<sup>113</sup> maka pada tanggal 25 Mei 1961 didirikan organisasi federasi dengan nama “Ikatan Pegawai Wanita Antar Departemen (IKWANDEP). Tujuan IKWANDEP adalah:

1. Ikut serta memperjuangkan perbaikan nasib perempuan Indonesia umumnya dan karyawan khususnya.
2. Membina dan memupuk persatuan serta persaudaraan sesama karyawan dan karyawan khususnya.
3. Memperjuangkan penghargaan serta pengembangan karier pada karyawan dalam bidang tugasnya masing-masing.

Gerakan perempuan dalam dunia politik dirasakan kemajuannya dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti dari jumlah perempuan yang berkarier dalam

---

<sup>113</sup> Departemen yang memprakarsai IKWANDEP adalah Departemen Penerangan, Kesehatan, Sosial, Kejaksaan, Agama, PDK, dan Perindustrian.

dunia politik semakin banyak per tahunnya. Di tahun 2009 ini jumlah calon legislatif perempuan tidak dapat dikatakan sedikit. Hal ini membuktikan bahwa perempuan dapat dengan mudah menggunakan hak untuk dipilih dalam jabatan politik.

c. Pertahanan keamanan

Pada masa perang kemerdekaan 1945 sampai 1949, keterlibatan perempuan dalam kelaskaran tidak dapat diragukan lagi. Gerakan perempuan pada masa itu terbukti dapat mempertahankan kerjasama mereka agar dapat membantu kaum pria dalam mencapai kemerdekaan. Dalam menjalankan tugas pertahanan dan keamanan pada masa perang kemerdekaan ini perempuan Indonesia bergabung dalam berbagai bentuk perjuangan yaitu sebagai berikut.

- a) Badan-badan perjuangan
- b) Kelaskaran atau kesatuan yang seluruhnya terdiri dari perempuan yang bekerjasama dengan Laskar Wanita Indonesia, laskar Putri, dan sebagainya.
- c) Kelaskaran bersama pria (Tentara Pelajar Wanita, Corps Mahasiswa Wanita, Corps Polisi Militer, dan sebagainya).
- d) Secara Perorangan

Perempuan yang tergabung dalam kelaskaran ikut berperang secara nyata bersama dengan kaum pria. Sedangkan perempuan yang berada dalam Badan-badan perjuangan kewajibannya lebih pada menyokong perang kemerdekaan melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung. hal ini dapat

terlihat dari kewajiban yang harus dilakukan PERWANI. Kegiatan PERWANI antara lain:

- a) Mengucapkan salam dengan pekik merdeka
- b) Mengibarkan bendera Merah Putih
- c) Memakai lencana Merah Putih
- d) Membantu KNI (Komite Nasional Indonesia) Di daerah.

Kegiatan yang hampir sama dilakukan juga oleh WANI (Wanita Indonesia). Mereka menyediakan makanan-makanan bagi para pejuang di medan perang. Mereka juga melakukan kegiatan menjahit perlengkapan-perengkapan perang pasukan di daerah pedalaman. Pada masa perang kemerdekaan, gerakan perempuan membantu masalah pertahanan dan keamanan sesuai dengan keahlian masing-masing sehingga kekurangan mereka sebagai perempuan tidak dijadikan penghalang dalam membantu perjuangan kemerdekaan.

Selain PERWANI dan WANI, terdapat juga Pusat Tenaga Perjuangan Wanita Indonesia (PTPWI). Badan ini dibentuk pada konferensi organisasi-organisasi Wanita Indonesia di Surakarta pada tanggal 26 Februari 1946.<sup>114</sup> PTPWI berkedudukan di Yogyakarta dan dipimpin oleh Ny. Sri Mangunsarkoro. Anggota PTPWI berasal dari kalangan, yaitu ketentaraan, keagamaan, Peburuhan, dan sosial. Badan ini memiliki tujuan untuk membantu pemerintah dengan memusatkan tenaga wanita untuk menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1945 terbentuk Perkumpulan

---

<sup>114</sup> KOWANI, *op. cit.*, hal. 71.

Pekerja Putri Surakarta (PPPS). Di dalam perebutan kekuasaan dengan Jepang PPPS ikut aktif membuat Bendera Merah Putih dan ikut dalam barisan yang menurunkan bendera Jepang di Balaikota Surakarta.<sup>115</sup> PPPS berubah nama menjadi Barisan Penolong ketika mengirimkan anggotanya ke Mojokerto, Ambarawa dan Salatiga. Tugas barisan penolong antara lain merawat korban perang, mengorganisir pengiriman makanan ke front, membentuk dan melaksanakan tugas dapur umum di daerah operasi.<sup>116</sup> PERWANI, WANI, PTPWI, dan PPPS merupakan badan perjuangan yang berkedudukan di Jawa.

Di luar Jawa Badan-Badan Perjuangan terdapat di Tapanuli, Tangkajene, Kalimantan dan Nusa Tenggara. Di Tapanuli juga terdapat PERWANI yang bekerja di dapur-dapur umum, menolong korban-korban perjuangan yang ditawan di dalam penjara dan membantu palang merah. Pada tanggal 27 Oktober 1945 di Tangkajene dibentuk Gerakan Putri Indonesia (GERPRI).<sup>117</sup> GERPRI mengusahakan dapur umum untuk bekas romusha dari seluruh Sumatera yang akan dipulangkan ke Jawa dan singgah di Tangkajene. GERPRI juga menolong para perempuan yang akan pulang ke Jawa setelah ditipu dan dibawa Jepang ke Singapura dan Sumatera.

PERWANI cabang Kalimantan didirikan pada tanggal 17 Desember 1946. PERWANI cabang Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin. Di Nusa Tenggara khususnya di Bali terdapat perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang dikenal dengan perang puputan. Dalam perang puputan

---

<sup>115</sup> KOWANI, *op. cit.*, hal. 72.

<sup>116</sup> *Idem*

<sup>117</sup> *Ibid.*, hal. 73.

perempuan-perempuan Bali juga ikut serta dalam mendirikan dapur umum, dan menjadi penghubung antara beberapa desa dan kota

Kelaskaran yang seluruhnya terdiri dari wanita, yaitu Barisan Putri, Laskar Wanita Indonesia (LASWI), Laskar Putri Indonesia (LPI Surakarta), Wanita Pembantu Perjuangan (WPP), Laskar Muslimat, dan Sabil Muslimat. Barisan Putri didirikan pada tahun 1944 sebagai bagian dari organisasi Jakarta Tokubetsu Si Fujinkai dan berpusat di Balai Kota Jakarta. Tugas Barisan Putri adalah mencuri senjata di kantor-kantor dan rumah-rumah orang Jepang, bersama-sama dengan pemuda Menteng 31 mengadakan siaran-siaran radio untuk seluruh Indonesia dan Luar Negeri tentang merdekanya Indonesia, membantu dapur umum di mana-mana, membantu perawatan korban pertempuran di rumah sakit dan Palang Merah Indonesia.<sup>118</sup> Laskar Wanita Indonesia (LASWI) dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1945 di Bandung yang dipimpin oleh Ny. S.Y. Arudji Kartawinata dan bermarkas di Gedung Mardihardja Jalan Pangeran Sumedang 91 Bandung. Tujuan pendirian LASWI adalah membantu pejuang-pejuang pria baik di garis depan maupun di garis belakang karena merasa terpanggil oleh revolusi. Kegiatan-kegiatan LASWI meliputi bidang social, intel dan pertempuran. Markas LASWI selalu berpindah-pindah mulai dari Ciparay, Majalaya, Garut dan Yogyakarta.<sup>119</sup>

Kelaskaran yang lain adalah Laskar Putri Indonesia (LPI) Surakarta. LPI Surakarta didirikan pada tanggal 31 Desember 1945. LPI memiliki tujuan

---

<sup>118</sup> Pada saat menjelang Proklamasi ketika sandang dan pangan semakin sukar didapat karena gudang-gudang selalu dijaga ketat oleh tentara Jepang, timbul inisiatif dari seorang anggota Barisan Putri untuk mencuri Hanco atau cap stempel yang biasa digunakan pada surat-surat untuk mengeluarkan barang dari gudang.

<sup>119</sup> Perubahan letak Markas LASWI terkait dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

untuk membentuk pasukan tempur wanita yang akan berjuang bersama pasukan pria dan pasukan bantuan untuk garis depan dan garis belakang. sebagai bentuk kelaskaran putri maka hierarki dalam LPI juga dipegang oleh perempuan. Pimpinan pertama adalah Nn. Sudiyem yang ketika sudah menikah dikenal dengan Ny. Mardowo. Wakil komandan adalah Nn. Siti Hartinah (istri mantan presiden Soeharto). Terdapat juga Nn. Ontosinah Mangkubumi. Komandan-komandan seksi juga dipimpin oleh perempuan.<sup>120</sup> Disamping LPI juga terdapat Wanita Pembantu Perjuangan (WPP). WPP Dibentuk di Bintaran Tengah no. 3 Yogyakarta pada tahun 1946. tujuan WPP adalah menyiapkan tenaga wanita muda untuk membantu perjuangan kemerdekaan baik di garis depan maupun di garis belakang. Anggota-anggotanya terdiri dari siswa SD, SMP, dan SMA. Pelatihannya dilakukan meliputi pelatihan kemiliteran, memasak untuk dapur umum, pemberantasan buta huruf, Sejarah Indonesia, tata Negara dan kesadaran nasional. Pelatihan lainnya yang juga wajib dijalani adalah budi pekerti dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kelaskaran wanita yang lainnya adalah Laskar Muslimat dan Sabil Musliman. Laskar Muslimat didirikan oleh Partai Perti Islam. Laskar ini berdiri di Bukittinggi. Laskar ini hamper terdapat di seluruh wilayah Sumatera Tengah (sekarang Sumatera Barat). Laskar Muslimat berjuang di garis depan, masuk dan keluar hutan, serta ikut *longmarch* dari gunung ke gunung dan dari bukit ke bukit. Sabil Musliman juga salah satu dari kelaskaran yang seluruh

---

<sup>120</sup> Komandan-komandan seksi terdiri dari Nn. Dartiyah, Nn. Prasasti dan Nn. Suripni.

anggotanya perempuan dan berada di Sumatera Tengah. Sabil Musliman didirikan pada tanggal 2 Oktober 1945 yang berpusat di Padang Panjang. Meskipun anggota Sabil Muslimat terdiri dari perempuan-perempuan muslim namun mereka memiliki semangat nasional yang tinggi. Anggota Sabil muslimat di (*front*) garis depan<sup>121</sup> memiliki tugas untuk mempertahankan diri, mendirikan dan menjalankan palang merah, memberi penerangan, membina mental anggota, melaksanakan tugas inteligen, dan menyelenggarakan dapur umum. Bagi yang berada di garis belakang memiliki tugas mengumpulkan bahan makanan, menjaga keamanan pada saat orang sholat jumat, memberi penerangan serta membagi dan mengangkut makanan ke *front* Padang luar kota.

Bentuk kegiatan perjuangan lainnya adalah kelaskaran bersama pria. Banyak perempuan yang tergabung dalam TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar) dan Corps Mahasiswa. Tugas mereka pada umumnya sama dengan para perempuan yang tergabung dengan badan-badan perjuangan dan kelaskaran. Di luar badan-badan perjuangan dan kelaskaran banyak juga para perempuan yang bekerja secara perorangan atau bersama-sama mendirikan palang merah dan membantu menyiapkan bahan pangan.

Dari pembahasan di atas maka hipotesis dinyatakan terbukti sebab para peserta Kongres Perempuan Indonesia I(1928) dapat memecahkan masalah-masalah social dan politik. Masalah sosial yang berhasil diatasi adalah masalah yang menyangkut perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-

---

<sup>121</sup> Anggota garis depan (*front*) Sabil Muslimat direkrut dari para perempuan yang telah dilatih perang gerilya dan berasal dari daerahnya sendiri dan ditambah dengan beberapa orang dari luar daerah.

laki dalam hukum perkawinan serta kesempatan memperoleh pendidikan, masalah poligami dan perkawinan anak usia dini. Sedangkan dalam bidang politik adalah keterlibatan perempuan dalam dunia politik.



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## BAB V

### KESIMPULAN

Kongres Perempuan Indonesia I menandakan sejumlah bentuk pergeseran cara bergerak perempuan Indonesia. Untuk mengkaji pergeseran tersebut maka ada beberapa permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini, yaitu 1) Apa latar belakang sosial dan politik diadakannya Kongres Perempuan Indonesia I?, 2) Bagaimana pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I?, 3) Apa hasil dari Kongres Perempuan Indonesia I?.

Sebagai tindakan awal dari penelitian atas permasalahan di atas maka penulis membuat hipotesis (jawaban sementara), yaitu:

1. Jika terjadi aksi gerakan politik pada masyarakat Indonesia dan terdapat perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam bidang sosial (menyangkut perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam hukum perkawinan dan kesempatan memperoleh pendidikan, terjadinya poligami dan perkawinan anak usia dini) maka Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22-25 Desember 1928 akan terjadi.
2. Jika peserta Kongres Perempuan Indonesia I dapat mengatasi perbedaan pendapat mengenai poligami maka Kongres Perempuan Indonesia I akan berjalan lancar .
3. Jika peserta Kongres Perempuan Indonesia I (1928) dapat memecahkan masalah-masalah sosial (menyangkut perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam hukum perkawinan dan kesempatan memperoleh pendidikan, terjadinya poligami dan perkawinan anak usia dini) dan politik

(keterlibatan perempuan dalam dunia politik) maka Kongres Perempuan I akan berhasil.

Maraknya aksi gerakan nasional dan terjadinya pembedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan latar belakang dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia I. Pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I diwarnai oleh diskusi-diskusi dan pidato dari peserta kongres. Dalam kongres itu terjadi perbedaan pendapat antara perwakilan dari pergerakan nasional, perkumpulan perempuan yang berafiliasi dengan pergerakan nasional, dan perkumpulan yang berhaluan agamis mengenai poligami. Perwakilan dari perkumpulan perempuan muslim tidak dapat menerima pendapat dari perwakilan perkumpulan lainnya yang mengecam poligami.

Namun perbedaan pendapat tersebut dapat diatasi dengan kembali pada pendapat masing-masing dan pembahasan permasalahan lebih dititikberatkan pada pembahasan kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan. Dengan demikian maka peserta yang mengecam poligami tidak merasa dirugikan dan peserta yang membenarkan poligami mendapatkan keadilan untuk menentukan sikap dalam hukum perkawinan Islam. Kongres Perempuan Indonesia I menghasilkan beberapa keputusan menyangkut kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan (Islam), perlindungan anak-anak dan wanita dalam perkawinan, mencegah perkawinan anak-anak, dan pendidikan bagi anak-anak Indonesia, terutama bagi anak-anak gadis. Dengan adanya beberapa keputusan itu maka Kongres Perempuan Indonesia I dapat dikatakan berhasil.

Uraian di atas merupakan pembuktian hipotesis. Pembuktian yang dibuat oleh penulis sesuai dengan jawaban sementara. Dengan demikian maka hipotesis dinyatakan terbukti.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Surjomihardjo,  
2000: *Sejarah Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta (1880-1930)*.  
Yayasan Untuk Indonesia, Yogyakarta.
- A.K. Pringgodigdo,  
1991: *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Dian Rakyat, Jakarta.
- Andy Yentriyani.  
2004: *Politik Perdagangan Perempuan*. Galang Press, Yogyakarta.
- Blackburn, Susan,  
2007: *Kongres Perempuan Indonesia Pertama: Tinjauan Ulang*. Yayasan  
Obor Indonesia, Jakarta.
- Goldstein, S Joshua ,  
2001: *War and Gender*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Hikmah Diniyah,  
2007: *Gerwani Bukan PKI*, CarasvatiBoooks, Yogyakarta
- Kongres Wanita Indonesia,  
1978: *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Balai  
Pustaka, Jakarta.
- Kuntowijoyo.  
1995: *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yayasan Bentang Budaya, Jakarta.
- Kuper, Adams dan Jessica Kuper,  
2000: *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. PT. Grafindo, Jakarta.
- Louis, Gottchalk,  
1975: *Mengerti Sejarah*. Indonesia University Press, Jakarta.
- Maggi Humm,  
1992: *Feminism*. Harvester Wheatsheaf, London.
- Maria Ulfah Subadio dan Ny. T.O. Ihromi,  
1978: *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Universitas Gadjah  
Mada, Yogyakarta.

Moedjanto, G,

1988: *Indonesia Abad ke-20 1*. Kanisius, Yogyakarta.

Nugroho Notosusanto,

1978: *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Yayasan idayu, Jakarta.

Program studi Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah.

2002: *Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah, seri XXVI, No. 1 April*.

Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Pusat Bahasa Depdiknas,

2007: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Rosemarie Putnam Tong,

1998: *Feminist Thought*. Westview Press, Colorado.

Sara M, Evan,

1994: *Lahir Untuk Kebebasan*. Yayasan Obor, Jakarta.

Sartono Kartodirjo, dkk,

1977: *Sejarah Nasional Indonesia V*. Balai Pustaka, Jakarta.

-----,

1990: *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Gramedia, Jakarta.

Sri Widowati Wiratmo Soekito,

1938: *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3S, Jakarta.

Suhartono,

1994: *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Sulastin, dkk,

1992: *Peranan Wanita Indonesia Dalam Pergerakan Nasional*.

Depdikbud, Jakarta.

Suyatin Kartowiyono,

1975: *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia*. Yayasan Idayu, Jakarta.

-----,

1983: *Mencari Makna Hidupku*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.

Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta,

1978: *Bunga Rampai Soempah Pemuda*. Balai Pustaka, Jakarta.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_nama\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_nama_Indonesia)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme>

<http://netsains.com/2008/03/lebih-jauh-mengenal-gerakan-sosial/>



Lampiran 1:

Organisasi-organisasi perempuan Indonesia yang dibentuk sebelum tahun 1928

| No. | Nama Organisasi                                | Tempat                     | Tahun Pembentukan |
|-----|--|----------------------------|-------------------|
| 1   | Poetri Mardika                                 | Jakarta                    | 1912              |
| 2   | Keoetamaan Istri                               | Bandung                    | 1913              |
| 3   | Keradjinan Amai Setia                          | Kota Gedang,<br>Minagkabau | 1914              |
| 4   | Wanita Hadi                                    | Jepara                     | 1915              |
| 5   | Pawijatan Wanita                               | Magelang                   | 1915              |
| 6   | Poerborini                                     | Tegal                      | 1917              |
| 7   | PIKAT (Pertjintaan Iboe Kepada Anak Temoeroen) | Manado                     | 1917              |
| 8   | Wanita Soesilo                                 | Pemalang                   | 1918              |
| 9   | Wanodjo Oetomo                                 | Yogyakarta                 | 1920              |
| 10  | Gorontaloische Mohammadaansche Vrouwenbeneging | Gorontalo                  | 1920              |
| 11  | Sarekat Kaoem Iboe Soematra                    | Bukittinggi                | 1920              |
| 12  | Kemadjoean Istri                               | Jakarta dan Bogor          | 1926              |
| 13  | Mardi Kamoeliaman                              | Madiun                     | 1927              |
| 14  | Ina Toeni                                      | Anbon                      | 1927              |
| 15  | Poeteri Setia                                  | Manado                     | 1928              |
| 16  | Wanita Sahati                                  | Jakarta                    | 1928              |

Sumber: Susan Blackburn, Kongres Perempuan Indonesia I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal xxvi

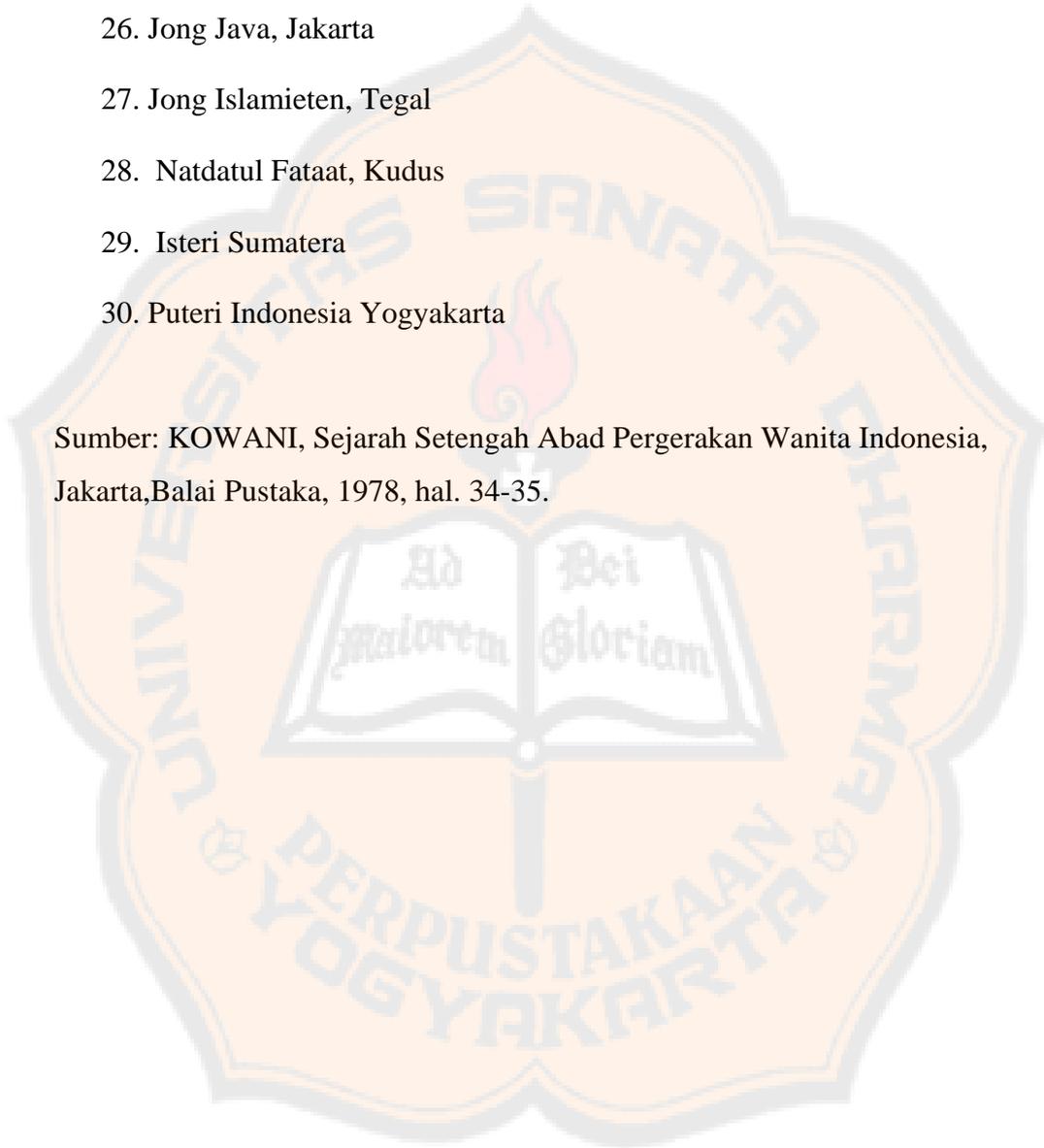
## Lampiran 2:

30 organisasi wanita yang hadir dalam Kongres Perempuan Indonesia I

1. Putri Budi Sejati, Surabaya
2. Putri Indonesia, Surabaya
3. Wanita Katolik, Solo
4. Rukun Wanodiyo, Jakarta
5. Wanita Sejati, Bandung
6. Putri Indonesia, Mataram
7. Darmo Laksmi, Salatiga
8. Budi Rini, Malang
9. Magining Kautaman, Kemayoran Jakarta
10. Karti Woro, Solo
11. Budi Wanito, Solo
12. Wanita Katolik, Mataram (Yogyakarta)
13. Jong Java, Mataram
14. Jong Java, Salatiga
15. Jong Islamieten Bond, Jakarta
16. Wanito Kencono, Banjarnegara
17. Sarekat Istri Buruh Indonesia, Surabaya
18. Hoofdbestuur Aisyyah
19. Sancoyo Rini, Solo
20. Aisyyah, Solo
21. Wanita Utama, Mataram
22. Wanita Mulyo, Mataram

23. Wanita Taman Siswa, Mataram
24. Panti Krido Wanito, Pekalongan
25. Jong Islamieten Bond, Tegal
26. Jong Java, Jakarta
27. Jong Islamieten, Tegal
28. Natdatul Fataat, Kudus
29. Isteri Sumatera
30. Puteri Indonesia Yogyakarta

Sumber: KOWANI, Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1978, hal. 34-35.



Lampiran 3 : **Keputusan KPI I****I. Mendirikan badan permufakatan bernama Perikatan Perempuan Indonesia.**

- a. Organisasi seperti perkumpulan biasa, yaitu dipimpin oleh pengurus harian, sekurang-kurangnya ada ketua, sekretaris, bendahara dan dua orang sekretaris.
- b. Biaya keanggotaan sedikitnya satu gulden.
- c. Mendirikan surat kabar. Redaksi dipilih oleh pengurus.
- d. Tempat kedudukan pengurus dipilih berdasarkan banyaknya jumlah anggota. Artinya, perkumpulan yang sudah masuk dalam keanggotaan mempunyai hak pendirian pengurus PPI.
- e. Keputusan saat ini, Yogyakarta yang menjadi tempat pendirian pengurus.
- f. Pengurus untuk sementara waktu:
  - 1) R. A. Soekonto (ketua)
  - 2) Sdr. Moegaroemah
  - 3) Nyi. Adjar Dewantoro
  - 4) Sdr. St. Moendjiah
  - 5) Sdr. St. Soekaptinah
  - 6) Sdr. Soejatien

Anggota pengurus lain akan dipilih oleh ketua.

- g. Yang sudah menjadi anggota PPI:
  - 1) Wanita Utama, Yogyakarta

- 2) Wanita Katolik, Yogyakarta
- 3) Taman Siswa, Yogyakarta
- 4) Aisyiyah, Yogyakarta
- 5) Cabang Perempuan Jong Islamieten Bond, Yogyakarta
- 6) Cabang Perempuan Pemuda Indonesia, Yogyakarta
- 7) Cabang Perempuan Jong Islamieten Bond, Batavia
- 8) Cabang Perempuan Jong Islamieten Bond, Tegal
- 9) Wanita Katolik, Solo
- 10) Karti Woro, Solo
- 11) Aisyiyah, Solo
- 12) Panti Krida Wanita, Pekalongan
- 13) Budi Wanita, Solo
- 14) Kesuma Rini, Kudus
- 15) Darma Laksmi, Salatiga
- 16) Putri Indonesia, Surabaya
- 17) Wanita Sejati, Bandung
- 18) Margining Kautaman, Kemayoran
- 19) Rukun Wanodiyo, Batavia (masuk setelah kongres)
- 20) Putri Budi Sejati, Surabaya (masuk setelah kongres)

## II. Beasiswa

- a. PPI mendirikan badan ini untuk menolong anak-anak perempuan yang tidak mampu membiayai sekolah.
- b. Badan ini dipisahkan dari badan PPI itu.

**III. Memperkuat Pendidikan pramuka, tetapi tentang pakaian dan hal lain terserah orangnya sendiri.**

**IV. Mencegah Perkawinan anak-anak.**

- a. Tiap-tiap anggota harus membuat propaganda tentang keburukan perkawinan semacam itu.
- b. Meminta tolong kepada pejabat pemerintah supaya menjelaskan kepada rakyat tentang hal tersebut

**V. Mengirim mosi kepada pemerintah**

- a. Supaya segera mengeluarkan keputusan dana untuk janda dan anak yatim.
- b. Minta supaya tunjangan jangan dicabut.
- c. Minta supaya sekolah perempuan diperbanyak.

**VI. Mengirim mosi kepada Majelis agama agar tiap taklik dikuatkan dengan surat sesuai dengan agama Islam.**

**Sekretaris KPI**

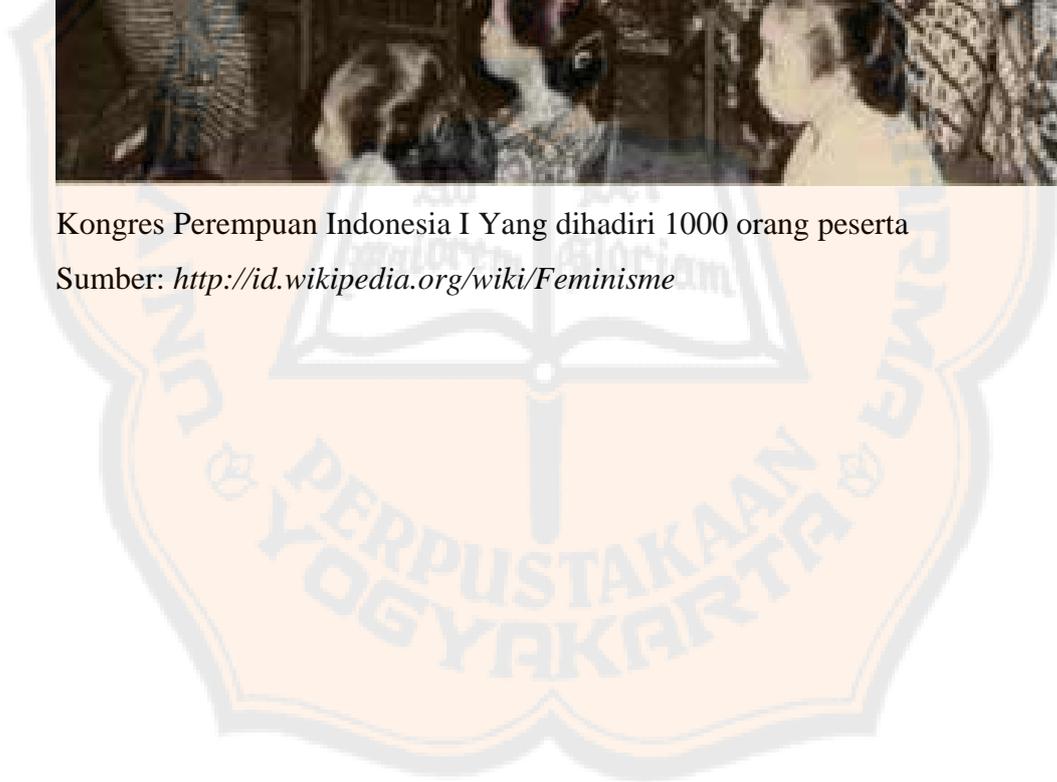
Sumber: Susan Blackburn, Kongres Perempuan Indonesia I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 145-147.

Lampiran 4



Kongres Perempuan Indonesia I Yang dihadiri 1000 orang peserta

Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme>



## Lampiran 5



22 Desember 1928. Kongres Perempuan Indonesia I. Dari kiri-kanan: Ny. B. Goelarso, Ny. Sujatin Kartowijono, Ny. Hardjodiningrat, Nyi. Hadjar Dewantara, Ny. Soekonto, Ny. Soenarjo Mangoenpoespito, Ny. Ismoediati Saleh, Ny. Moendjiah, Ny. Anwar, Ny. Dirjowongso.

Sumber: Susan Blackburn, Kongres Perempuan Indonesia I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 225.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN

Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 DEPOK  
 Program : Ilmu Pengetahuan Sosial  
 Mata Pelajaran : Sejarah  
 Kelas/semester : XI/1  
 Standar Kompetensi : 2. Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang.

| Kompetensi dasar   | Indikator  | Materi pembelajaran  | Pembelajaran   | Penilaian  |                             |   | Alokasi waktu | Media/bahan                                | Sumber   |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|---------------|--|--|
|  |  |  |  | Jenis tagihan                                      | Bentuk tagihan              | Contoh tagihan                                |               |  |  |
| 2.2 Menganalisis hubungan antara perkembangan paham-paham baru dan transformasi sosial dengan kesadaran dan pergerakan kebangsaan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mendeskripsi dan menganalisis latar belakang sosial dan politik dilaksanakan Kongres Perempuan Indonesia I (1928)</li> <li>▪ Mendeskripsi dan menganalisis pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I</li> </ul> | Kongres Perempuan Indonesia I (1928). <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Latar belakang sosial dan politik dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia I (1928)</li> <li>▪ Pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I (1928)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Siswa mampu mendeskripsi dan menganalisis keadaan dan aksi gerakan politik, keadaan perempuan, gerakan perempuan Indonesia pada masa Hindia Belanda.</li> <li>▪ Siswa mampu mendeskripsi dan menganalisis latar belakang</li> </ul> | Tugas individu, tugas kelompok, dan ulangan harian | LKS, lembar kerja kelompok. | Siswa menyera hkan hasil diskusi kelompoknya. | 3 x 45 menit  | Buku, gambar, white Board, dan viewer/OHP. | -Sujatin Kartowijono, 1983, Mencari Makna Hidupku, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.<br>-KOWA NI, 1978, Sejarah |

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

|  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>(1928)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mendeskripsi dan menganalisis hasil dari Kongres Perempuan Indonesia I (1928)</li> <li>▪ Merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam Kongres Perempuan Indonesia I (1928).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil dari Kongres Perempuan Indonesia I (1928)</li> </ul> | <p>sosial, politik, dan pendidikan, serta peran tokoh Kongres Perempuan Indonesia I, persiapan dan pelaksanaan kongres.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Siswa mampu mendeskripsi dan menganalisis keputusan dan dampak Kongres Perempuan Indonesia I (1928) bagi perkembangan gerakan perempuan di kemudian hari.</li> <li>▪ Siswa mampu Merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam Kongres Perempuan Indonesia I.</li> </ul> |  |  |  |  |  | <p>Setengah Abad Pergerakan Perempuan Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. -Siti Waridah, dkk, 2003, Sejarah Nasional dan Umum, Jilid 2, Bumi Aksara, Jakarta.</p> |
|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Sekolah</b>             | <b>: SMA Negeri 1 Depok</b>                           |
| <b>Mata Pelajaran</b>      | <b>: Sejarah</b>                                      |
| <b>Kelas / semester</b>    | <b>: XI/ 1</b>  |
| <b>Materi Pokok</b>        | <b>: Kongres Perempuan Indonesia I (1928)</b>         |
| <b>Pertemuan</b>           | <b>: 1</b>  |
| <b>Metode Pembelajaran</b> | <b>: Diskusi dan tanya jawab dengan teknik jigsaw</b> |
| <b>Alokasi Waktu</b>       | <b>: 3 x 45 menit (2 pertemuan)</b>                   |

**A. Standar Kompetensi**

2. Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang.

**B. Kompetensi Dasar**

2.2. Menganalisis hubungan antara perkembangan paham-paham baru dan transformasi sosial dengan kesadaran dan pergerakan kebangsaan.

**C. Indikator**

- a) Mendeskripsi dan menganalisis latar belakang sosial dan politik dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia I (1928).
- b) Mendeskripsi dan menganalisis pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I (1928).
- c) Mendeskripsi dan menganalisis hasil dari Kongres Perempuan Indonesia I (1928).

**D. Tujuan Pembelajaran**

- a) Siswa mampu mendeskripsi dan menganalisis keadaan dan aksi gerakan politik, keadaan dan gerakan sosial perempuan Indonesia pada masa Hindia Belanda.

- b) Siswa mampu mendeskripsi dan menganalisis latar belakang sosial, politik dan pendidikan tokoh-tokoh Kongres Perempuan Indonesia I serta perannya dalam persiapan dan pelaksanaan Kongres.
- c) Siswa mampu mendeskripsi dan menganalisis keputusan dan dampak Kongres Perempuan Indonesia I bagi gerakan perempuan di kemudian hari.

**E. Materi Pembelajaran**

- Latar belakang sosial dan politik dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia I (1928)
  - Keadaan dan aksi gerakan politik
  - Keadaan dan aksi gerakan sosial perempuan Indonesia pada masa Hindia Belanda
- Pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I (1928)
  - Latar belakang sosial, politik dan pendidikan serta peran tokoh Kongres Perempuan Indonesia I.
  - Persiapan dan pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I
- Hasil dari Kongres Perempuan Indonesia I (1928)
  - Keputusan Kongres Perempuan Indonesia I
  - Dampak Kongres Perempuan Indonesia I bagi gerakan perempuan di kemudian hari.

**F. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran**

| NO                 | Kegiatan  | Alokasi Waktu  | Metode |
|--------------------|---|----------------|--------|
| <b>Pertemuan 1</b> |   |                |        |
| 1.                 | <p><b>Pendahuluan</b></p> <p>-Motivasi: Siswa dapat memahami latar belakang, pelaksanaan, hasil serta pengaruh Kongres Perempuan Indonesia I bagi pergerakan perempuan di kemudian hari.</p> <p>- Prasyarat: Siswa telah menguasai materi Sejarah</p> | <b>5 menit</b> |        |



|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
|           | <p>salah seorang anggota kelompoknya untuk berdiskusi dengan kelompok lain yang berbeda topik diskusinya.</p> <p>✚ Guru meminta utusan dari setiap kelompok untuk kembali pada kelompoknya masing-masing dan melaporkan hasil diskusinya dengan kelompok lain.</p> <p>✚ Guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas dan kelompok lain memberi tanggapan.</p> | <p><b>5 menit</b></p> <p><b>40 menit</b></p> |  |
| <b>3.</b> | <p><b>Penutup</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guru meminta siswa untuk merefleksikan dan menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Kongres Perempuan Indonesia I.</li> <li>- Guru memberikan penguatan kepada siswa tentang materi yang telah mereka bahas.</li> </ul>  | <p><b>25 menit</b></p>                       |  |

**G. Media Pembelajaran**

-Buku, Gambar, White board, viewer/OHP

**H. Penilaian**

a. Penilaian produk

Jenis tagihan : tes tertulis

Contoh tes

Bacalah pertanyaan di bawah ini dengan cermat lalu tuliskan jawabannya.

1. Jelaskan tentang latar belakang dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia I!
2. Mengapa Kongres Perempuan Indonesia I tidak membahas masalah politik?
3. Apa pengaruh Kongres Perempuan I terhadap eksistensi gerakan perempuan Indonesia?

b. Penilaian Proses

Jenis tagihan : tugas kelompok

Contoh.

1. Coba diskusikan bersama kelompokmu tentang keadaan dan aksi gerakan politik pada masa Hindia Belanda yang mendorong dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia I!
2. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas dan bagi yang belum mendapatkan giliran presentasi berikan tanggapan terhadap presentasi kelompok lain!

Penilaian keterampilan *cooperative*:

| NO | Menghargai teman | Mengambil giliran | Mengajukan pertanyaan | Mempresentasikan hasil | Menjawab pertanyaan | Mendengarkan dengan aktif | Jml |
|----|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-----|
|    |                  |                   |                       |                        |                     |                           |     |
|    |                  |                   |                       |                        |                     |                           |     |

Keterangan:

Aktif : Mengajukan pertanyaan, dan menjawab pertanyaan.

Pasif : Tidak mengajukan dan menjawab pertanyaan

Kooperatif :Mengambil giliran, mempresentasikan hasil, dan mendengarkan dengan aktif.

Tidak kooperatif : Tidak mengambil giliran, tidak mempresentasikan hasil, dan tidak mendengarkan dengan aktif.

Kriteria penilaian menggunakan skala sikap 1-5, dengan kriteria :

✚ Skor 1 : Pasif, tidak kooperatif dan tidak menghargai teman

- + Skor 2 : Pasif, tidak kooperatif tetapi dapat menghargai teman
- + Skor 3 : Pasif, kooperatif dan dapat menghargai teman
- + Skor 4 : Aktif, kooperatif, dan dapat menghargai teman
- + Skor 5 : Sangat aktif, sangat kooperatif dan dapat menghargai teman

$$N = \frac{\text{Jumlah skor}}{5} \times 100 =$$

5

$$Na = \frac{\text{Nilai Produk} + \text{Nilai Proses}}{2} =$$

2

c. Tindak Lanjut

- Siswa dinyatakan berhasil apabila tingkat pencapaiannya sama dengan 60%
- Memberikan program remedial bagi siswa yang tingkat pencapaiannya kurang dari 60%
- Memberikan program pengayaan bagi siswa yang tingkat pencapaiannya lebih dari 60%

**I. Sumber**

- Sujatin Kartowijono, 1983, Mencari Makna Hidupku, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.
- KOWANI, 1978, Sejarah Setengah Abad Pergerakan Perempuan Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Siti Waridah, dkk, 2003, Sejarah Nasional dan Umum, Jilid 2, Bumi Aksara, Jakarta

Mengetahui,  
Kepala Sekolah

Yogyakarta, 25 November 2009  
Guru matapelajaran

Drs. B. Musidi, M.Pd.

Rica Enipramita

NIM : 051314013